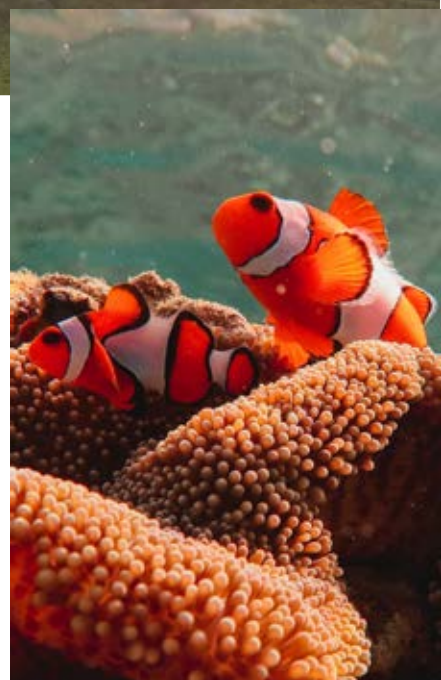




RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029



RENCANA STRATEGIS

2025

2029

BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA



BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

RENCANA STRATEGIS

BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

TAHUN 2025 - 2029

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab	: Kepala Balai TN Karimunjawa
Pengarah	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha TN Karimunjawa
Ketua	: Kepala Urusan Pengelolaan, Perencanaan, Program dan Anggaran TN Karimunjawa
Anggota	: Nur Afendi, S.Hut. Hani Dwi Trisnarningsih, S.Hut., M.Ling. Dionecia Y.U., S.E. Dhimas Ony Prasetyowidi, S.Kom.

Diterbitkan oleh:

BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Alamat : Jl. Sinar Waluyo Raya No.248 Semarang

Tlp: +62 24 76738248, Fax: +62 24 76738248

Email: btn.karimunjawa@kehutanan.go.id; Web : tnkarimunjawa.id



Penetasan Semi Alami Penyu di Taman Nasional Karimunjawa



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
NOMOR 115.1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA,

- Menimbang : 1. bahwa dengan telah ditetapkan dan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 yang mewujudkan keselarasan antara struktur organisasi dan tata kerja dengan perencanaan kinerja di lingkup Kementerian Kehutanan;
2. bahwa Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
3. bahwa dengan telah ditetapkan dan untuk menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 200 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa tentang Rencana Strategis Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2025 – 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2025-2029 di seluruh satuan kerja lingkup Balai Taman Nasional Karimunjawa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 30 Desember 2025



KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA,

WIDYASTUTI, S.H., M.Hum.

NIP. 19681203 199403 2 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Karimunjawa
- b. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Kemujan
- c. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Karimunjawa



Lumba-lumba di Perairan Taman Nasional Karimunjawa

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI
TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
Nomor: SK. 115.1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
TAHUN 2025 - 2029

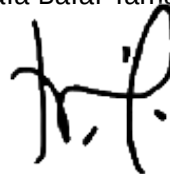
KATA PENGANTAR

Balai Taman Nasional Karimunjawa menjadi benteng terakhir kawasan perairan merujuk pada fungsinya sebagai garda terdepan dalam melindungi dan mengelola ekosistem laut yang kaya di kawasan tersebut dengan berpegang pada upaya konservasi. Konservasi dimaknai sebagai rasionalisasi pemanfaatan yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman. Penyusunan Rencana Strategis Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2025- 2029 merupakan penjabaran dan penyelarasan target secara hirarkis dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025 - 2029. Penjabaran dan penyelarasan target ini bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis secara berjenjang dari tingkat unit pelaksana teknis dalam hal ini Balai Taman Nasional Karimunjawa.

Besar harapan kami bahwa rencana strategis ini dapat benar-benar menjadi pedoman dalam perencanaan kegiatan selama lima tahun kedepan di Balai Taman Nasional Karimunjawa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, terarah dan terukur. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya.

Semarang, Desember 2025

Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa



Widyastuti, S.H., M.Hum.

NIP. 196812031994032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
IKHTISAR EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Capaian Kinerja dan Anggaran	8
1.3 Potensi dan Tantangan.....	21
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	29
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan	29
2.2 Visi, Misi dan Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE	35
2.3 Visi, Misi dan Sasaran Kegiatan Balai Taman Nasional Karimunjawa.....	44
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	49
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	49
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan	52
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal KSDAE	55
3.4 Arah dan Kebijakan Strategis Balai Taman Nasional Karimunjawa.....	57
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	67
4.1 Target Kinerja	67
4.2 Kerangka Pendanaan	76
BAB V PENUTUP.....	78
SENARAI PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Kawasan Taman Nasional Karimunjawa.....	1
Tabel 2. Zona Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2024	3
Tabel 3. Capaian Kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2020 – 2024	9
Tabel 4. Kebutuhan Pendanaan dan Penggunaan Anggaran Tahun 2020 – 2024	20
Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029	32
Tabel 6. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen KSDAE	37
Tabel 7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2025 – 2029	45
Tabel 8. Intervensi Direktorat Jenderal KSDAE dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan	55
Tabel 9. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2025 – 2029	57
Tabel 10. Indikator Kinerja (IK) RPJMN Tahun 2025-2029 pada Direktorat Jenderal KSDAE	67
Tabel 11. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Dirjen KSDAE pada periode 2025 – 2029	69
Tabel 12. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Taman Nasional Karimunjawa	73
Tabel 13. Kerangka Pendanaan Target Kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2025-2029	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Karimunjawa	6
Gambar 2. Persentase Realisasi Anggaran TN Karimunjawa Tahun 2020 – 2024.....	20
Gambar 3. Posisi Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa	28
Gambar 4. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029	29
Gambar 5. Peta Strategi Pembangunan KSDAE Tahun 2025-2029.....	36
Gambar 6. Peta Strategi Pembangunan Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2025-2029.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA TAHUN 2025-2029.....	82
LAMPIRAN 2. INDIKATIF LOKASI TARGET KINERJA	90



Pantai Tanjung Gelam di Pulau Karimunjawa

IKHTISAR EKSEKUTIF

Taman Nasional Karimunjawa merupakan kawasan konservasi perairan yang berada di perairan Laut Jawa. Pelaksanaan upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia, utamanya dimandatkan kepada Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal KSDAE. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan. Dalam melaksanakan mandat tersebut, dibutuhkan arahan pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka menengah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan RPJPN 2025-2045 yang dikenal dengan RPJPN Indonesia Emas 2045. Presiden Republik Indonesia dalam periode 2025-2029 telah pula menetapkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta Asta Cita yang uraiannya telah melebur ke dalam RPJMN 2025-2029. Sebagai turunannya di lingkup Kementerian Kehutanan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 dengan visi menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam pernyataan visi dan misinya, Kementerian Kehutanan menegaskan peran dan kontribusinya dalam pencapaian empat pilar pembangunan berkelanjutan. Merujuk pada berbagai regulasi dan arahan pembangunan, perencanaan strategis Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029 mengusung tema “*Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*”. Tiga sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE sejalan dengan upaya pencapaian pilar pembangunan lingkungan, pilar sosial, serta pilar pembangunan ekonomi. Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan berdampak positif terhadap kelestarian keanekaragaman hayati. Tiga sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan indikator kinerja program: (a) jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN *Red List*; dan (b) Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN *Red List*.

Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga, dengan indikator kinerja program Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB.

Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem, dengan indikator kinerja program: (a) Nilai ekspor TSL dan *bioprospecting*; dan (b) Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2025- 2029 merupakan penjabaran dan penyelarasan target secara hirarkis dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025 - 2029. Penjabaran dan penyelarasan target ini bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis secara berjenjang dari tingkat unit pelaksana teknis dalam hal ini Balai Taman Nasional Karimunjawa.

Isu utama dalam upaya pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati serta sasaran dan indikator kinerja pada Balai Taman Nasional Karimunjawa diuraikan sebagai berikut:

- a. Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB, dimana perencanaan yang efektif menjadi faktor pengungkit bagi efektifitas pengelolaan KSA, KPA dan TB secara keseluruhan.
- b. Persentase Entitas Kerjasama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel, dimana tata kelola kerjasama yang efektif dapat dicapai dimulai dari kepatuhan terhadap kelengkapan administrasi dan kedisiplinan dalam memenuhi setiap tahapan kewajiban.
- c. Jumlah Unit KSA, KPA, Dan TB dengan kategori Pengelolaan Efektif, dimana Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dan mendukung terlaksananya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kawasan kepada publik melalui alat *Management Effectiveness Tracking Tools* (METT).
- d. Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati didefinisikan sebagai jumlah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang dibina UPT melalui berbagai kegiatan guna

mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Dalam tataran operasional kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar KSA/KPA/TB serta kegiatan bina cinta alam.

- e. Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan, dimana akan diukur tidak pada seluruh jenis-jenis jasa ekosistem seperti pada definisi umumnya
- f. Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan *e-ticketing* dan *cashless payment*, dimana batasan pengukuran akan dilakukan terhadap seberapa banyak pintu masuk obyek wisata alam yang telah menerapkan *e-ticketing* dan *cashless payment*.
- g. Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB, dimana indikator ini mengukur tingkat peningkatan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.
- h. Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya, dimana keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah penyediaan data dan informasi kekayaan spesies, sebaran spesies, kepadatan serta estimasi populasi melalui kegiatan inventarisasi.
- i. Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB, dimana bertujuan untuk mengembalikan sepenuhnya integritas ekosistem ke tingkat/ kondisi aslinya, atau kepada kondisi masa depan tertentu (*desired future condition/ DFC*) sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan.

Keberhasilan Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam tahun 2025-2029 akan diukur dengan 6 (enam) sasaran kegiatan serta 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan. Keseluruhan target kinerja tersebut, secara berjenjang akan mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE. Upaya pencapaian sasaran kegiatan Balai Taman Nasional Karimunjawa akan dilaksanakan melalui enam kegiatan, yaitu:

Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik (1 IKK);

Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (3 IKK);

Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi (1 IKK);

Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati (2 IKK);

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (2 IKK); serta

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal KSDAE (2 IKK)



Ikan Badut (Amphiprion percula) di Perairan Pulau Menjangan Kecil

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Taman Nasional Karimunjawa merupakan kawasan konservasi perairan yang berada di perairan Laut Jawa. Kawasan Taman Nasional Karimunjawa terletak 45 mil laut di Barat Laut Kota Jepara. Kawasan ini merupakan bagian dari gugusan pulau di Kepulauan Karimunjawa yang terdiri atas 30 pulau. Namun demikian tidak seluruh kawasan ini merupakan bagian Taman Nasional Karimunjawa. Secara geografis Taman Nasional Karimunjawa terletak pada koordinat 5°40'39"-5°55'00" LS dan 110°05' 57" - 110°31' 15" BT. Keberadaan kawasan ini secara fisik di lapangan ditandai dengan pemasangan dua unit rambu suar kuning yang berlokasi di Sebelah Utara Pulau Sintok dan di Utara Pulau Bengkoang. Terdapat empat titik referensi yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan posisi garis batas Taman Nasional Karimunjawa yaitu di Utara Pulau Geleang, Tanjung Pudak Pulau Karimunjawa, Barat Daya Pulau Nyamuk dan di Utara Pulau Kembar. Secara administratif kawasan ini masuk dalam wilayah Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah. Di sekitar kawasan ini terdapat empat desa yaitu Desa Karimunjawa, Desa Kemujan, Desa Parang dan Desa Nyamuk. Umumnya penduduk bekerja sebagai pencari ikan, mencari kerang (gleaning), budidaya, berjualan hasil laut, pertanian, perkebunan tanaman keras (karet, kopi, kelapa), pegawai (negeri/swasta) dan pekerjaan lain yaitu buruh bangunan, pertukangan, dan pemandu wisata. Taman Nasional Karimunjawa mempunyai luas kawasan 111.625 hektar (Tabel 1).

Tabel 1. Luas Kawasan Taman Nasional Karimunjawa

KAWASAN	LUAS (HEKTAR)
Wilayah daratan di Pulau Karimunjawa yang berupa ekosistem hutan tropis dataran rendah, ekosistem hutan pantai dan ekosistem hutan mangrove	1.285,50
Wilayah daratan di Pulau Kemujan yang berupa ekosistem hutan mangrove	222,20
Wilayah perairan laut berupa ekosistem padang lamun dan ekosistem terumbu karang. Dalam perkembangannya kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam	110.117,30

(KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menhut No. 74/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001	
TOTAL LUAS KAWASAN	111.625,00

Taman Nasional Karimunjawa mempunyai ekosistem asli dengan keanekaragaman hayati tinggi mulai dari daratan hingga perairan yang perlu dipertahankan dan dimanfaatkan secara lestari dan bijaksana sebagai aset nasional maupun daerah. Secara historis, pada awalnya Taman Nasional Karimunjawa ditetapkan sebagai Cagar Alam Laut pada tanggal 9 April 1996 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/1986. Selanjutnya kawasan ini diubah penetapannya menjadi Taman Nasional Karimunjawa melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.78/Kpts-II/1999 seluas 111.625 hektar yang meliputi 110.117,30 hektar kawasan perairan laut, 1.285,50 hektar berupa kawasan hutan tropis dataran rendah di Pulau Karimunjawa, dan 222,20 hektar berupa hutan mangrove. Pada tahun 2001, seluruh kawasan perairan di Taman Nasional Karimunjawa ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam perairan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.74/Kpts-II/2001.

Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan. Taman Nasional Karimunjawa mengemban tugas untuk mengelola kawasan konservasi melalui pembagian wilayah yang disebut zonasi. Zona Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Nomor SK.48/KSDAE/RKK/KSA.0/2/2024 tentang Zona Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Saat ini kawasan Taman Nasional Karimunjawa memiliki delapan zona yaitu Zona Inti, Zona Rimba, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pemanfaatan Darat, Zona Pemanfaatan Wisata Bahari, Zona Budidaya Bahari, Zona Religi, Budaya dan Sejarah, Zona Rehabiltasi dan Zona Tradisional Perikanan.

Tabel 2. Zona Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2024

NO	ZONA	LUAS (HEKTAR)	LOKASI
1	Zona Inti	446,179	Sebagian perairan Pulau Kumbang, Taka Menyawakan, Taka Malang, dan Perairan Tanjung Bomang, Sebelah Utara Pulau Nyamuk
2	Zona Rimba	1.431,937	Hutan Tropis Dataran Rendah di Pulau Karimunjawa dan Hutan Mangrove di Pulau Kemujan
3	Zona Perlindungan Bahari	2.481,211	Sebagian Perairan Pulau Sintok, Gosong Tengah, Pulau Bengkoang bagian utara Pulau Cemara Besar bagian selatan, Pulau Cemara Kecil bagian utara, Pulau Geleang, Pulau Burung, perairan selatan Pulau Menjangan kecil, timur Pulau Nyamuk, Perairan Karang Kapal, Karang Besi bagian selatan, Pulau Krakal Besar bagian utara, Gosong Kumbang, Pulau Kembar bagian utara dan Gosong Selikur
4	Zona Pemanfaatan	3.761,69	Di kawasan darat terdiri atas areal trekking mangrove di Pulau Kemujan, Areal Legon Lele, areal Nyamplung Ragas, areal pemanfaatan air di hutan tropis dataran rendah Di kawasan perairan terdiri atas sebagian Perairan Pulau Menjangan Besar, perairan Pulau Menjangan Kecil, perairan Pulau Menyawakan, perairan Pulau Kembar bagian selatan, perairan Pulau Tengah bagian selatan, perairan sebelah Timur Pulau Kumbang, perairan Pulau Bengkoang bagian selatan, Indonor, dan perairan Pulau Cemara Besar bagian utara, perairan Pulau Cemara Kecil bagian utara, perairan Pulau Katang, perairan Krakal Besar bagian selatan, perairan Krakal Kecil, perairan Pulau Cilik, perairan Gosong Seloka, perairan di sekitar Pulau Karimunjawa, perairan di sekitar Pulau Kemujan
5	Zona Religi, Budaya dan Sejarah	1,81	Areal Makam Sunan Nyamplungan, areal Makam Mbah Kambang di Pulau Karimunjawa

NO	ZONA	LUAS (HEKTAR)	LOKASI
6	Zona Rehabilitasi	4,37	Sebagian perairan Pulau Tengah, perairan Pulau Cilik, perairan Gosong Seloka, perairan Mrican, perairan Tanjung Gelam, Perairan Pulau Sintok Areal rehabilitasi di hutan mangrove di Pulau Kemujan dan Pulau Karimunjawa
7	Zona Khusus	1.181,48	Areal pelabuhan Penyeberangan di Pulau Karimunjawa, areal Pelabuhan Perintis di Pulau Karimunjawa, areal pelabuhan Dermaga Barat di Pulau Karimunjawa, areal Pelabuhan Legon Bajak di Pulau Kemujan, dermaga desa di Pulau Kemujan, areal Labuh Kapal di perairan sebelah barat Pulau Kemujan, areal pelabuhan di Pulau Parang, areal Pelabuhan di Pulau Nyamuk. Jalan yang melintasi hutan mangrove di Pulau Kemujan.
8	Zona Tradisional	102.316,323	Seluruh perairan di luar zona yang telah ditetapkan yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Di kawasan darat berupa Babakan yang ada di kawasan hutan mangrove di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan

Taman Nasional Karimunjawa sejak penunjukannya dimanfaatkan untuk kegiatan wisata, pendidikan, penelitian dan pelatihan. Hal ini sesuai dengan UU No.32 tahun 2024 bahwa kawasan taman nasional dapat dimanfaatkan untuk aktivitas penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Keanekaragaman hayati yang tinggi menjadikan kawasan ini sebagai laboratorium alam yang ideal bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Jawa Tengah. Taman Nasional Karimunjawa ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Jawa Tengah. Bahkan secara nasional kawasan ini ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata nasional di Indonesia. Jumlah kunjungan Taman Nasional Karimunjawa pada tahun 2024 sejumlah 42.681 orang. Berdasarkan asal pengunjung secara umum terdapat 34.031 pengunjung nusantara dan 8.650 pengunjung manca negara. Sedangkan berdasarkan tujuan kunjungan terdapat 60 kunjungan untuk penelitian, 1.175 untuk pendidikan, 41.437 untuk rekreasi, dan 9 untuk tujuan lain-lain. Jumlah kunjungan ini berpengaruh pada penerimaan pungutan negara bukan pajak yang menjadi target setiap tahunnya. Balai TN Karimunjawa telah melakukan penarikan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2014. Pada Tanggal 30 Oktober s/d Desember 2024 telah diberlakukan tarif baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2024, target penerimaan PNBP Taman Nasional Karimunjawa adalah Rp. 434.030.000, 00 sedangkan realisasi penerimaan adalah Rp 1.586.187.500, 00.

Pengelolaan kawasan konservasi tidak pernah lepas dari keterlibatan masyarakat yang berada disekitar kawasan. Bentuk pelibatan dalam skala kecil berupa pelibatan masyarakat pada kegiatan teknis sebagai anggota Masyarakat Mitra Polhut (MMP), buruh, penggunaan sewa kapal, sewa alat selam. Peningkatan kesejahteraan juga dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pada usaha kecil yang sedang dikembangkan oleh kelompok masyarakat. Pemberian bantuan untuk pengembangan usaha ekonomi juga digulirkan selama rentang waktu 2020 – 2024 kepada beberapa kelompok tani hutan binaan Penyuluh Kehutanan meliputi: SPKP Karya Bhakti Karimunjawa, SPKP Manga Delima Kemukan, SPKP Prima Parang, dan Pokja Kawasan Pengelolaan Desa Nyamuk.

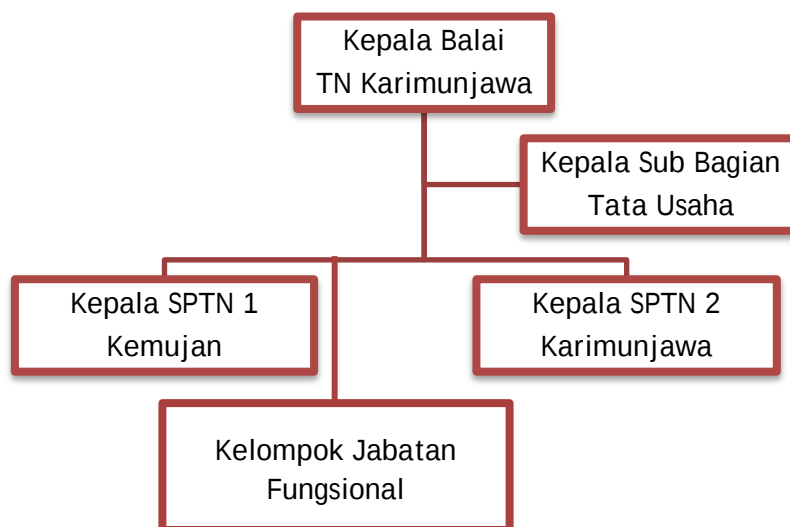
Perlindungan kawasan merupakan salah satu pilar pengelolaan kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Upaya perlindungan ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan pengamanan kawasan yang dilakukan secara pre-emptif, preventif, maupun represif bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum. Kegiatan pengamanan yang dilakukan di kawasan Taman Nasional Karimunjawa adalah Sosialisasi Peraturan baik di dalam maupun di luar kawasan, Patroli Rutin baik di kawasan terestrial maupun perairan, Patroli Gabungan di kawasan perairan dan terestrial serta pelaksanaan Patroli Bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) serta Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Secara umum, gangguan yang dihadapi di kawasan konservasi adalah berupa pendudukan kawasan hutan, pencurian hasil hutan dan pengambilan satwa dilindungi serta perubahan bentang alam dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Dari tahun 2002-2024, telah dilakukan sejumlah penindakan kasus pelanggaran hukum sebanyak 41 kasus dengan pidana berkisar 2 bulan penjara hingga 1 tahun 10 bulan penjara.

Taman Nasional Karimunjawa pertama kali ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional Karimunjawa berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 bersama dengan 22 Taman Nasional dan 12 Unit Taman Nasional di seluruh Indonesia. Balai Taman Nasional Karimunjawa merupakan Unit Pelaksana Teknis tipe B yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Balai Taman Nasional Karimunjawa merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai Taman

Nasional Karimunjawa merupakan Balai Taman Nasional Tipe B dengan susunan organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Balai
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kemujan
- d. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Karimunjawa

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Karimunjawa



Sesuai dengan peraturan tersebut, Balai Taman Nasional Karimunjawa mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Taman Nasional Karimunjawa menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan taman nasional;
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
- c. Pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional di taman nasional;
- e. Pelaksanaan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di taman nasional;

- f. Pelaksanaan pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;
- g. Pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/ atau karbon di taman nasional;
- h. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan taman nasional;
- i. Pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan taman nasional;
- j. Pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional;
- k. Pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di taman nasional;
- l. Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dalam dan sekitar taman nasional;
- m. Pelaksanaan penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
- n. Pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
- o. Pelaksanaan fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional;
- p. Pelaksanaan pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional; dan
- q. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pengelolaan kawasan Taman Nasional Karimunjawa didukung dengan kepastian penganggaran yang berasal dari DIPA dan penyediaan sarana prasarana. Anggaran yang dikelola Balai Taman Nasional Karimunjawa pada tahun 2020 - 2024 sebesar Rp.83.252.636.000. Rata-rata realisasi penggunaan anggaran selama lima tahun adalah 97,01%. Realisasi tertinggi tercapai pada tahun 2024 pada angka 99,75%. Sarana prasarana yang dikelola sebagai Barang Milik Negara berupa barang persediaan, tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, software dan aset lainnya berdasarkan perhitungan tahun 2024 memiliki nilai aset mencapai Rp.23.971.211.106,00.

1.2 Capaian Kinerja dan Anggaran

1.2.1 Capaian Kinerja

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, menyatakan bahwa taman nasional adalah unit pengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Berdasarkan struktur organisasi baru Dirjen KSDAE tidak mengalami perubahan program, tetap masuk dalam 3 (tiga) program yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup, dan Program Dukungan Manajemen, tetapi menambah 1 kegiatan yaitu pemulihan ekosistem. Tanggung jawab mencapai target pembangunan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing eselon II di tingkat pusat sebagai penanggung jawab kegiatan, sedangkan teknis operasionalnya di lapangan menjadi tanggung jawab Unit Pengelola Teknis (UPT). Taman Nasional Karimunjawa sebagai Unit Pelaksana Teknis memiliki peran dalam pelaksanaan program Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dilaksanakan oleh Taman Nasional Karimunjawa terdiri dari 20 IKK. Berdasarkan penghitungan tersebut diatas, maka capaian kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa di tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOL	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA KUMULATIF										CAPAIAN (%)	KATEGORI
				2020		2021		2022		2023		2024			
				T	C	T	C	T	C	T	C	T	C		
	Program Dukungan Manajemen														
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE														
1	Nilai SAKIP pada Ditjen KSDAE	3	Poin	78	79,37	78,5	80,02	79	79,12	79,5	79.9	80	87,49	109	Sangat Baik
2	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi sumberdaya Alam dan Ekosistem yang tertib dan akuntabel (Dokumen)	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100	Sangat Baik
3	Level maturitas SPIP	2	Level	-	-	-	-	3	3	3	3,7	4	3,76	94	Sangat Baik
	Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi														
4	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif		Hektar	510	1.037	1.400	2.693	10.000	10.959	405	405	362,4	57.836	150	Sangat Baik
5	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan.		Unit KK	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	100	Sangat Baik

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOL	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA KUMULATIF										CAPAIAN (%)	KATEGORI
				2020		2021		2022		2023		2024			
				T	C	T	C	T	C	T	C	T	C		
6	Jumlah Kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi		Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	100	Sangat Baik
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi														
7	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi		Hektar	-	-	3	3	3,39	112	-	-	-	-	150	Sangat Baik
8	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran		Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Sangat Baik
9	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya		Unit KK	1	-	1	-	1	1	1	-	1	1	100	Sangat Baik
10	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat		Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	100	Sangat Baik

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOL	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA KUMULATIF										CAPAIAN (%)	KATEGORI
				2020		2021		2022		2023		2024			
				T	C	T	C	T	C	T	C	T	C		
11	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan		Hektar	-	-	10.000	10.953,98	11.450	13637,89	-	-	-	-	119	Sangat Baik
12	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam		Orang	-	-	-	-	1	1	1	16	1	5	150	Sangat Baik
13	Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya		Kelompok	-	4	-	-	-	-	1	1	1	4	150	Sangat Baik
	Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik														
14	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif		Hektar	14.723	14.723	111.625	111.625	111.625	111.625	7.487,55	7.488	111.625	0	100	Sangat Baik
15	Jumlah penyelamatan satwa liar			-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	100	Sangat Baik
	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi														
16	Jumlah destinasi wisata alam prioritas		Destinasi	-	-		-	1	1	-	-	-	-	100	Sangat Baik

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOL	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA KUMULATIF										CAPAIAN (%)	KATEGORI
				2020		2021		2022		2023		2024			
				T	C	T	C	T	C	T	C	T	C		
17	Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air		Entitas	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	100	Sangat Baik
18	Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education		Destinasi	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	100	Sangat Baik
19	Jumlah destinasi wisata alam bahari		Destinasi	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	100	Sangat Baik
	Kegiatan Pemulihan Ekosistem														
20	Luas ekosistem yang dipulihkan		Hektar	-	-	6,25	6,25	0,8023	0,94234	7,264524	7,12	1,15061	0,08	93	Sangat Baik
Rata-rata														105,7	Sangat Baik

Terdapat **20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** pada renstra Balai Taman Nasional Karimunjawa tahun 2020 – 2024. Rata-rata capaian kinerja pada akhir renstra adalah **105,7%**. Sehingga capaian kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa termasuk dalam kategori **Sangat Baik/Sangat Berhasil**. Berikut penjabarannya :

A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

IKK 1 Nilai SAKIP adalah penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang didapatkan dari integrasi antara sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pelaporan kinerja, dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Ditjen KSDAE di tahun 2020 adalah 79,37, tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 80.02, tahun 2022 turun menjadi 79.12, tahun 2023 naik kembali menjadi 79.9 dan akhirnya pada tahun 2024 menjadi 87,49. Capaian ini melampaui dari angka yang ditargetkan di Ditjen KSDAE pada lima tahun 2020-2024 adalah 80 poin. Persentase capaian Nilai SAKIP pada Ditjen KSDAE sebesar **109%**, kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 2 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi sumberdaya Alam dan Ekosistem yang tertib dan akuntabel tahun 2020-2024 adalah 1 dokumen pada tiap tahunnya. Unit Pelaksana Teknis berkontribusi untuk memberikan poin pada pencapaian nilai tersebut. Capaian target tersebut telah tercapai **100%**, kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 3 Level maturitas SPIP berdasarkan penilaian oleh Tim BPKP, nilai maturitas SPIP tahun 2024 sebesar 3,76 Level maturitas ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3,70 dan tahun 2022 sebesar 3. Persentase capaian level maturitas SPIP sebesar **94%**, kriteria kinerja **sangat baik**.

B. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

IKK 4 Luas Kawasan Hutan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Tinggi Secara Partisipatif memiliki target yang berbeda beda pada tiap tahunnya selama 2020-2024. IKK ini dilakukan melalui output Luas Kawasan sebagai penyediaan Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada indikator Luas Kawasan Hutan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Tinggi Secara Partisipatif pada angka maksimal yaitu **150%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 5 Jumlah Unit Kawasan Konservasi yang Dilakukan Pemolaan, Penataan dan Perencanaan memiliki target yang sama pada 2 tahun terakhir selama 2020-2024. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan di Taman Nasional Karimunjawa dilaksanakan dengan kegiatan revisi zona pengelolaan tahun 2023 dan penyusunan dokumen perencanaan seperti

Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) tahun 2020-2024, dokumen desain tapak pengelolaan pariwisata alam tahun 2023 dan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang 2017-2027. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada indikator Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan pada angka yaitu **100%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 6 Jumlah Kerjasama Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis pada Kawasan Konservasi memiliki target yang sama pada 2 tahun terakhir selama 2020-2024. Pada rencana strategis tahun 2020 – 2024, target Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah 1 dokumen Kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi pada tahun 2023 dan 2024. Balai Taman Nasional Karimunjawa melakukan kerja sama penguatan fungsi dengan lima kelompok yaitu SPKP Karya Bhakti Karimunjawa, SPKP Mangga Delima Kemujan, SPKP Prima Parang, Pokja Kawasan Pengelolaan Desa Nyamuk dan Yayasan Jaringan Satwa Indonesia dan satu kerjasama pembangunan strategis sehingga pada rentang waktu lima tahun ini, terdapat 6 perjanjian Kerjasama. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada IKK Jumlah Kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (dokumen). pada angka maksimal yaitu **100%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 7 Luas Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi memiliki target yang berbeda beda pada tiap tahunnya selama 2020-2024. Tantangan pengelolaan kawasan di Taman Nasional Karimunjawa diantaranya adalah perambahan, illegal logging, illegal fishing, pemanfaatan tumbuhan/satwa dilindungi, dan penyalahgunaan fungsi zonasi. Pengawasan terhadap lokasi konflik di Taman Nasional Karimunjawa mencakup ekosistem darat dan perairan. Pengawasan di ekosistem darat melalui patroli berfokus di 17 lokasi dengan luas pemantauan mencapai 38,74 Ha. Pengawasan di darat tidak menemukan adanya penambahan luas area konflik. Tim Taman Nasional Karimunjawa dapat mencegah terjadinya penambahan lokasi konflik di Blok Cikmas yang berbatasan langsung dengan pal batas TN 23 E 24. Pengawasan di ekosistem perairan mencakup luas 73,4 Hektar. Dari hasil pemantauan tidak ditemukan adanya penambahan luas bangunan wisma apung, tidak ditemukan penambahan luas kolam hiu dan tidak ditemukan penambahan luas bangunan jety. Pendampingan dan sosialisasi terhadap pemilik wisma apung. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada IKK Luas Penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi (Hektar) pada angka maksimal yaitu **150%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 8 Jumlah Kawasan Konservasi Yang Ditingkatkan Perlindungan Penanganan dan Pengendalian Kebakaran memiliki target yang sama pada tiap tahunnya selama 2020-2024. Taman Nasional Karimunjawa memiliki kawasan hutan tropis dataran rendah seluas 1.285,50 Hektar dan hutan mangrove 222,20 Hektar. Ekosistem hutan tropis dataran rendah memiliki sumber air yang bermanfaat bagi kebutuhan air penduduk di Karimunjawa. Peran penting ekosistem hutan harus dijaga agar tetap memberikan manfaat yang optimal. Salah satu ancaman yang keberadaan hutan tropis dataran rendah adalah perambahan dan kebakaran. Untuk menekan ancaman tersebut dilakukan patroli secara berkala melalui patroli pengamanan hutan maupun patroli partisipatif bersama Masyarakat Mitra Polhut. Patroli untuk memantau ekosistem mangrove juga dilakukan secara berkala, mengingat ekosistem mangrove secara ekologis juga menghadapi tekanan eksploitasi sumberdaya, perubahan iklim dan kegiatan yang berhubungan dengan manusia. Daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi berada disekitar Dukuh Cikmas, Nyamplungan, Kemloko, Legon Lele dan Jatikerep. Patroli di Dukuh Nyamplungan menemukan jalur batas antara kebun masyarakat dengan kawasan hutan mangrove yang mulai tertutup. Langkah yang dilakukan adalah memulihkan jalur batas kawasan mangrove dengan kebun masyarakat. Hal ini penting dilakukan agar aktivitas masyarakat seperti membakar sampah di kebun tidak mengancam hutan mangrove. Jalur batas kawasan di Dukuh Legon lele dan Jatikerep kondisinya masih bagus atau tidak tertutup. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada IKK Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran (Unit) pada angka yaitu **100%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 9 Jumlah Kawasan Konservasi yang dinilai Efektivitas Pengelolaannya memiliki target yang sama pada tiap tahunnya selama 2020-2024. Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dengan menggunakan metode *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Balai Taman Nasional Karimunjawa telah melaksanakan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan pada tahun 2015, 2017, 2019, 2022 dan 2024,. Nilai yang dicapai berturut-turut adalah 77, 72, 79, 75 dan 80. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada IKK Jumlah Kawasan Konservasi yang dinilai Efektivitas Pengelolaannya (Unit KK) pada angka yaitu **100%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 10 Jumlah Desa di Kawasan Konservasi yang Mendapatkan Pendampingan memiliki target yang sama pada tiap tahunnya selama 2020-2024. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam berpedoman pada Peraturan Menteri LHK nomor 43 tahun 2017. Pemberdayaan masyarakat meliputi

pengembangan desa konservasi, pemberian akses, fasilitasi kemitraan, pemberian izin perusahaan jasa wisata alam dan pembangunan pondok wisata. Pendampingan terhadap kelompok masyarakat telah dilakukan di empat desa yaitu Desa Karimunjawa, Kemujan, Parang dan Nyamuk. Pendampingan pada kelompok Mangga Delima di Desa Kemujan dilakukan pada usaha budidaya rumput laut. Kelompok ini sedang dalam proses penanaman rumput laut. Kelompok KPDN di Desa Nyamuk melakukan pembesaran ikan kerapu. Kendala yang dihadapi oleh kelompok adalah kesulitan untuk mendapatkan bibit kerapu berukuran 10 cm. Pembesaran ikan kerapu baru terlaksana pada bulan Oktober dari rencana awal bulan Agustus. Kelompok SPKP Prima di Desa Parang didampingi oleh penyuluh Taman Nasional Karimunjawa dalam hal pengembangan usaha pembuatan es batu. Tantangan yang dihadapi berupa biaya operasional pembuatan es batu lebih tinggi dari yang direncanakan. Namun demikian hal ini tidak menyurutkan semangat kelompok untuk terus melanjutkan usaha dengan konsekuensi keuntungan yang didapatkan lebih sedikit dari yang direncanakan. Terpenuhinya pendampingan kelompok di empat desa ini menjadi indikator tercapainya IKK ini. Harapannya dengan adanya bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi (PUE) kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) ini bisa semakin mendukung pengembangan usaha ekonomi dan kesejahteraan anggota KTH tersebut sehingga makin jaya. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada IKK Jumlah Desa di Kawasan Konservasi yang Mendapatkan Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat pada angka yaitu **100%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 11 Luas Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional kepada Masyarakat di Kawasan memiliki target yang berbeda pada 2 tahun selama 2020-2024. Pada **tahun 2021** Balai Taman Nasional Karimunjawa menargetkan pemberian akses seluas 10.000 Hektar. Target pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat merupakan bentuk komitmen Balai Taman Nasional Karimunjawa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Pemberian akses dilakukan pada zona tradisional di sekitar perairan Pulau Nyamuk. Luas akses yang diberikan sebelumnya adalah 620 Hektar. Rangkaian pencapaian IKK ini diikuti dengan penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat yang melibatkan para pemangku kepentingan. Tahapan penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat meliputi persiapan, penyusunan, penilaian dan pengesahan dan evaluasi. Sasaran Pemberdayaan adalah masyarakat di Kecamatan Karimunjawa yang terdiri dari Desa Karimunjawa, Desa Kemujan, Desa Nyamuk dan Desa Parang. Kegiatan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat masing-masing Desa tersebut. Fokus pemberdayaan pada seluruh desa adalah mendorong diversifikasi mata pencaharian masyarakat agar tidak hanya tergantung pada satu jenis usaha dan mendorong pengembangan produk unggulan lokal.

Secara garis besar, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan Balai Taman Nasional Karimunjawa pada tahun 2022-2026 adalah peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, kelompok binaan dan membangun kemitraan dan jejaring. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada IKK Luas Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional kepada Masyarakat di Kawasan pada angka yaitu **115%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 12 Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam memiliki target yang sama pada periode 2020-2024. Pada dokumen Renstra tahun 2020-2024, Taman Nasional Karimunjawa menargetkan 3 orang kader yang berstatus aktif. Sampai dengan tahun 2024 kader konservasi yang berstatus aktif sebanyak **16 orang**. Indikator kinerja ini didukung melalui pelaksanaan kegiatan berupa kunjungan pendidikan ke sekolah dasar di Desa Kemujan, Karimunjawa, Nyamuk dan Parang. Pembentukan kader konservasi yang diikuti oleh 16 orang dengan kisaran usia 15 – 30 tahun. Peserta berasal dari empat desa yang ada di Kecamatan Karimunjawa. Kegiatan ini terlaksana pada 20 – 21 Oktober 2023, kader yang terbentuk nantinya merupakan kader pada tingkat pemula. Jumlah kader konservasi merupakan penanda capaian pada IKK ini. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada IKK Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam (Orang).

IKK 13 Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahnya memiliki target yang sama tiap tahunnya pada periode 2020-2024. Taman Nasional Karimunjawa melakukan kemitraan konservasi pada beberapa kelompok yang terdapat di empat desa yaitu Desa Karimunjawa, Kemujan, Parang dan Nyamuk. Pemberian bantuan dan pendampingan kepada kelompok dilakukan secara berkala terhadap kelompok yang melakukan kegiatan usaha. Pendampingan terhadap kelompok masyarakat telah dilakukan di empat desa yaitu Desa Karimunjawa, Kemujan, Parang dan Nyamuk. Pendampingan pada kelompok Mangga Delima di Desa Kemujan dilakukan pada usaha budidaya rumput laut. Kelompok ini sedang dalam proses penanaman rumput laut. Kelompok KPDN di Desa Nyamuk melakukan pembesaran ikan kerapu. Kendala yang dihadapi oleh kelompok adalah kesulitan untuk mendapatkan bibit kerapu berukuran 10 cm. Pembesaran ikan kerapu baru terlaksana pada bulan Oktober dari rencana awal bulan Agustus. Kelompok SPKP Prima di Desa Parang didampingi oleh penyuluh Taman Nasional Karimunjawa dalam hal pengembangan usaha pembuatan es batu. Indikator kinerja kegiatan ini mencapai realisasi target 100% atau kategori sangat berhasil. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada IKK Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya pada angka yaitu **150%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 14 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif memiliki target yang berbeda setiap tahunnya pada periode 2020-2024. Penanggung jawab Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada IKK Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif pada angka yaitu **100%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 15 Jumlah Penyelamatan Satwa Liar memiliki target yang berbeda pada 2 tahun terakhir periode 2020-2024. Pemantauan terhadap jenis burung di Taman Nasional Karimunjawa dilakukan di empat resort yaitu Resort Nyamuk, Resort Legon Lele, Resort Telaga dan Resort Parang. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada IKK Jumlah Penyelamatan Satwa Liar dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif pada angka yaitu **100%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 16 Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas memiliki target 1 destinasi periode 2020-2024. Taman Nasional Karimunjawa merupakan daerah tujuan wisata di Jawa Tengah. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada IKK Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas pada angka yaitu **100%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 17 Jumlah Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air memiliki target yang sama pada 2 tahun terakhir periode 2020-2024. Ekosistem hutan tropis dataran rendah memiliki sumber air yang bermanfaat bagi kebutuhan air penduduk di Karimunjawa. Pada tahun 2018 ditetapkan dua lokasi sebagai areal pemanfaatan air dan energy air di Taman Nasional Karimunjawa yaitu sumber air di Legon Lele dan sumber air di Nyamplungan. Di tahun 2023 ini dilakukan pemantauan pada pemanfaatan air Blok Nyamplungan I, Blok Makam Nyamplungan, Blok Legon Lele 1 dan Legon Lele 2. Debit air berturut turut: 16,69 L/detik, 11,53 L/detik, 24,38 L/detik dan 262,4 L/detik. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada IKK Jumlah Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air pada angka yaitu **100%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 18 Kegiatan wisata Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education dipusatkan pada pemahaman satwa penyu. Balai Taman Nasional Karimunjawa mempunyai fasilitas Penetasan Semi Alami Penyu yang difokuskan untuk upaya pelestarian penyu. Pengunjung dapat belajar upaya konservasi penyu dan jika memungkinkan melakukan pelepasan tukik. Kawasan Taman Nasional Karimunjawa merupakan habitat

bagi Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*). Pada tahun 2012 dan 2022 dijumpai pula perjumpaan Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*). Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada IKK Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education berada pada angka **100%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 19 Wisata Bahari yaitu wisata yang objek dan daya tariknya bersumber dari potensi bentang laut (*seascape*) maupun bentang darat pantai (*coastal landscape*) (Wirada 2012). Pada bentang laut dapat dilakukan kegiatan *snorkeling*, *diving*, *fishing*, *swimming* dan pada bentang darat dapat dilakukan kegiatan berjemur, susur pantai, berkemah dan kegiatan lainnya sambil menikmati pemandangan alam sekitar. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 22. Jumlah Destinasi Wisata Alam Bahari memiliki target yang sama pada 2 tahun terakhir periode 2020-2024. Kegiatan wisata bahari pada dasarnya mengutamakan pemanfaatan lokasi- lokasi pantai yang berpasir putih dan kawasan taman laut yang memiliki terumbu karang dengan keanekaragaman biota lautnya. Beberapa lokasi untuk wisata bahari adalah perairan Pulau Menjangan Kecil, Cemara Besar, Pulau Tengah. Selain itu kawasan Taman Nasional Karimunjawa menyimpan potensi keberadaan kapal tenggelam yang berumur lebih dari 50 tahun sehingga memungkinkan untuk *wreck diving* dan petualangan bawah laut. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada IKK Jumlah destinasi wisata alam bahari pada angka yaitu **100%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

IKK 20 Luas Ekosistem yang Dipulihkan memiliki target yang berbeda tiap tahun pada periode 2020-2024. Persentase capaian renstra 2020-2024 di Taman Nasional Karimunjawa pada IKK Luas Ekosistem yang Dipulihkan pada angka yaitu **93%** sehingga kriteria kinerja **sangat baik**.

1.2.2 Capaian Anggaran

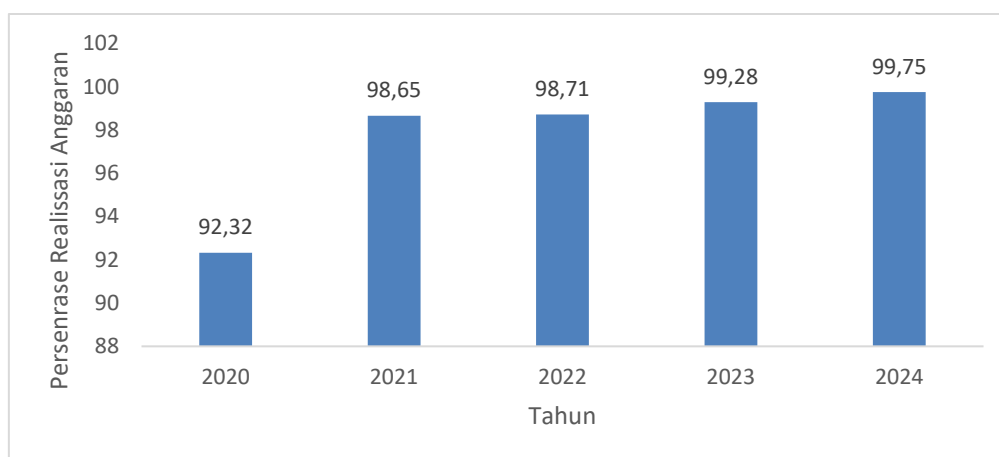
Kebutuhan pendanaan pencapaian target kinerja di Balai Taman Nasional Karimunjawa secara indikatif dari tahun 2020 - 2024 adalah Rp 85.717.816 000,- Pada pelaksanaannya, selama tahun 2020 – 2024, total anggaran yang dikelola Balai Taman Nasional Karimunjawa Rp 83.252.636.000,-. Rata-rata realisasi penggunaan anggaran selama lima tahun adalah 97,01%. Pada akhir renstra, realisasi anggaran di tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu dari 99,28% menjadi 99,75%. Realisasi tertinggi tercapai pada tahun 2024 pada angka 99,75%. Sepanjang lima tahun, realisasi tertinggi dapat dicapai pada tahun 2024. Taman Nasional Karimunjawa melakukan antisipasi pada realisasi anggaran yang rendah dengan cara melakukan penghitungan

belanja pegawai sesuai dengan kebutuhan yaitu memperhitungkan pegawai pensiun, pegawai baru maupun alih tugas. Penyesuaian juga dilakukan terhadap komponen kegiatan, sehingga pada pelaksanaan anggaran tahun 2024 ini terdapat 13 kali revisi.

Tabel 4. Kebutuhan Pendanaan dan Penggunaan Anggaran Tahun 2020 – 2024

TAHUN	KEBUTUHAN PENDANAAN PADA RENSTRA TAHUN 2020 - 2024 (RP)	PENGUNAAN ANGGARAN SEPANJANG TAHUN 2020 - 2024 (RP)
2020	14.195.693.000	14.195.693.000
2021	13.850.631.000	13.850.631.000
2022	15.076.801.000	15.657.408.000
2023	20.232.104.000	19.320.304.000
2024	22.362.587 .000	20.228.600.000
Total	85.717.816 000	83.252.636.000

Gambar 2. Persentase Realisasi Anggaran TN Karimunjawa Tahun 2020 – 2024



1.3 Potensi dan Tantangan

1.3.1 Potensi

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi Sumber Daya Alam di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa merupakan perwakilan lima tipe ekosistem yaitu ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun dan rumput laut, ekosistem hutan mangrove, vegetasi pantai, serta ekosistem hutan tropis dataran rendah. Keberadaan ekosistem tersebut sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem hidrologi dan iklim mikro wilayah kepulauan Karimunjawa. Hilang atau rusaknya salah satu ekosistem yang ada akan menyebabkan ketidakseimbangan fungsi ekosistem lainnya. Ekosistem tersebut merupakan habitat bagi berbagai tumbuhan (flora) dan satwa liar (fauna) baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi Undang – Undang. Berdasarkan data statistik TN Karimunjawa tahun 2024 dan laporan Inventarisasi Mangrove tahun 2021 terdapat 103 jenis flora hutan tropis dataran rendah, 45 jenis mangrove yang terdiri dari 27 jenis mangrove sejati (25 jenis berada di dalam Kawasan dan 2 jenis berada di luar Kawasan), 18 jenis flora mangrove ikutan (9 jenis berada di dalam Kawasan dan 9 jenis berada di luar kawasan), 126 jenis vegetasi pantai, 9 jenis vegetasi lamun, 31 jenis vegetasi makroalga, 129 jenis jamur dan 9 jenis lumut. Sedangkan jenis fauna di Taman Nasional Karimunjawa tercatat 7 jenis mamalia, 25 reptil, 138 jenis burung, 22 jenis burung air, 433 jenis ikan laut, 76 jenis kerang genera, 178 jenis kerang keras, 23 jenis kerang lunak, 255 jenis invertebrata, 35 jenis porifera/sponge, dan 36 jenis makrobentos.

Upaya konservasi dilakukan untuk menjamin kelestarian tumbuhan dan satwa yang ada di kawasan Taman Nasional dengan menerapkan prinsip perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan. Upaya pengelolaan tersebut dituangkan dalam berbagai kegiatan pembinaan populasi dan pembinaan habitat. Pembinaan populasi diprioritaskan pada jenis-jenis yang diindikasikan telah mengalami penurunan populasi terlebih jenis yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Pembinaan habitat dilakukan dengan tujuan utama untuk memulihkan habitat tumbuhan dan satwa sehingga habitat tersebut akan mampu mendukung keberlangsungan hidup tumbuhan dan satwa.

1.3.2 Ekosistem Hutan Tropis Dataran Rendah

Ekosistem hutan tropis dataran rendah menempati ketinggian 0-506 m dpl di Pulau Karimunjawa. Hutan tropis dataran rendah yang ada di Pulau Karimunjawa merupakan hutan sekunder yang dicirikan dengan keberadaan perintis seperti Medang Wangi (*Cryptocarya tomentosa*) (Nababan *et al*, 2010). Tumbuhan yang ada merupakan sisa kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1950-1960an. Berdasarkan hasil Eksplorasi Flora

yang dilakukan oleh LIPI tahun 2003 (Djarwaningsih *et al.*, 2003) ditemukan 124 spesies dan 5 genus flora di kawasan hutan hujan tropis dataran rendah Karimunjawa. Jenis pohon yang sering dijumpai adalah Sentul (*Sandoricum koetjape*), Ande-ande (*Antidesma montanum*), Berasan (*Gomphia serrata*), Gondorio (*Bouea macrophylla*). Termasuk di dalamnya keberadaan flora khas Karimunjawa yaitu Dewadaru (*Fragrarea fragrans*) dan Kalimosodo (*Cordia subcordata*) yang populasinya mulai menurun karena banyak digunakan sebagai bahan baku industri kerajinan oleh masyarakat. Dewadaru tidak ditemukan dalam kawasan konservasi kecuali tunggakunya, umumnya tumbuh di luar kawasan yaitu di daerah Alang-Alang, Ujung Gelam, Nyamplungan, dan Legon Nipah (Farid *et al.*, 2003).

Berbagai jenis fauna menghuni kawasan hutan hujan tropis dataran rendah ini. Jenis fauna darat yang umum dijumpai adalah Rusa (*Cervus timorensis*), Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis karimondjawa*), kalong besar (*Pteropus vampyrus*), tikus pohon ekor polos (*Niviventer cremoniventer*), landak (*Hystrix javanica*), musang rase (*Vivericula indica*). Mogea *et al.*, (2003) menyebutkan terdapat 16 jenis reptilia dan dua jenis amphibia di Taman Nasional Karimunjawa, diantara reptil terdapat jenis Ular Edor (*Calloselasma rhodostoma*). Lebih lanjut Mogea *et al.* (2003) menyatakan bahwa di Karimunjawa ditemukan 23 jenis kupu dari 8 famili. Jenis-jenis kupu endemik adalah *Euploea crameri karimondjawaensis*, *Euploea sylvester karimondjawaensis* dan *Idea leuconoe karimondjawa*. Ditemukan sebanyak 8 jenis Capung sedangkan pada jenis Belalang dijumpai 6 jenis. Selain itu ditemukan 54 spesies burung yang tergabung dalam 27 famili, 16 jenis diantaranya merupakan spesies yang dilindungi Undang-Undang. Berbagai jenis burung khas yang dapat dijumpai di Karimunjawa adalah Pergam Ketanjar (*Ducula rosaceae*), Trocokan (*Picnonotus govier var.karimunjawa*) dan Betet Karimunjawa (*Psitacula alexandri var.karimunjawa*). Selain itu ditemukan pula sekitar 22 spesies burung air migran yang melintasi kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

1.3.3 Vegetasi Pantai

Beberapa karakteristik vegetasi ini adalah hidup pada daerah kering tepi pantai, tidak terpengaruh iklim, tanah berbatu dan berpasir serta terletak diatas pasang tertinggi (Nababan *et al.*, 2010). Vegetasi pantai dicirikan oleh adanya *Barringtonia speciosa*, Ketapang (*Terminalia cattapa*), Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*), Kelapa (*Cocos nucifera*), Jati Pasir (*Scaerota frutescens*), Pandan (*Pandanus tectonus*), Setigi (*Pemphis acidula*) dan Waru Laut (*Hibiscus tiliaceus*).

1.3.4 Ekosistem Mangrove

Taman Nasional Karimunjawa mempunyai ekosistem hutan mangrove yang relatif masih asli dan tersebar hampir di seluruh kepulauan Karimunjawa dengan luasan yang berbeda-beda (Anonim, 2008). Berdasarkan hasil Kegiatan Inventarisasi Penyebaran Mangrove di Taman Nasional Karimunjawa tahun 2002 (Sunyoto et al, 2003) ditemukan 44 spesies mangrove yang termasuk dalam 25 famili. Dalam kawasan pelestarian ditemukan 25 spesies mangrove sejati dari 13 famili dan 18 spesies mangrove ikutan dari 7 famili. Sedang di luar kawasan ditemukan 5 spesies mangrove ikutan dari 5 famili berbeda.

Ekosistem hutan mangrove juga menjadi habitat berbagai jenis satwa diantaranya adalah makrobentos. Terdapat 24 jenis makrobenthos dari 4 kelas (Efendy, 2014). Lebih lanjut ditemukan 8 spesies gastropoda dari 5 family yaitu *Cerithidea cingulate cingulate*, *Terebralia sulcata*, *Telescopium telescopium* (Potamididae):, *Natica gualteriana*, *Neritina violacea* (Neritidae), *Cassidula nucleus* (Ellobiidae); *Rhinoclavis vertagus* (Cerithiidae); *Cymatium pileare* (Ranellidae). (Syaiful imam, 2014).

1.3.5 Ekosistem Padang Lamun

Padang lamun tersebar di seluruh perairan Taman Nasional Karimunjawa sampai kedalaman 25 meter. Struktur komunitas padang lamun Pulau Karimunjawa tersusun atas 9 spesies yaitu *Enhalus acoroides*, *Halophila ovalis*, *Thalassia hemprichi*, *Cymodocea rotundata*, *Halodule uninervis*, *Halodule pinifolia*, *Halophila minor*, *Syringodium isoetiliun*, *Thalassodendron ciliatum* (Anonim, 2008). Tabel 3 menyajikan penutupan dan jenis yang ada di tiap wilayah dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Sedangkan untuk makroalga, sampai saat ini penelitian menunjukkan bahwa terdapat 19 jenis makroalga di lokasi penelitian dengan jumlah terbesar adalah Chlorophyta (Wahyuningtyas, 2000).

1.3.6 Ekosistem Terumbu Karang

Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem utama bagi kawasan Taman Nasional Karimunjawa mengingat wilayah perairan laut mendominasi luasan Taman Nasional Karimunjawa. Ekosistem terumbu karang di Taman Nasional Karimunjawa terdiri atas 3 tipe terumbu, yaitu terumbu karang pantai (*fringing reef*), penghalang (*barrier reef*) dan beberapa taka (*patch reef*). Sampai dengan tahun 2019, terdapat ekosistem terumbu karang di Kepulauan Karimunjawa terdiri atas 77 genera karang keras yang termasuk dalam 19 famili (Muhidin dkk, 2019). Sedangkan jenis yang mendominasi ekosistem ini adalah genera *Acropora*, *Porites* dan *Montipora*. Hasil monitoring menunjukkan bahwa persentase penutupan terumbu karang di kawasan Taman Nasional Karimunjawa yang berada pada kategori Baik (rerata 64,70%) atau dengan kata lain

mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan persentase penutupan periode tahun 2019 yaitu sebesar 53,80% (Gambar 1) (Muhidin dkk, 2022). Persentase penutupan karang keras tertinggi berada di perairan Pulau Tengah, perairan Taka Malang, Gosong Selikur, Karang Kapal dan Bengkoang.

Pada ekosistem terumbu karang terdapat ikan karang. Karakteristik ikan karang di Karimunjawa cukup unik. Keanekaragaman ikan karang yang ditemukan di Karimunjawa merupakan kondisi peralihan antara jenis-jenis ikan karang yang sering ditemukan di perairan Kepulauan Seribu dan di perairan Bali (Marnane *et al* , 2003). Sampai dengan tahun 2019, secara total jumlah spesies ikan karang yang ditemukan selama survei di seluruh perairan Karimunjawa adalah 542 spesies yang termasuk dalam 152 genus dan 51 famili (Muhidin dkk, 2019). Hasil monitoring menunjukkan bahwa kelimpahan ikan di semua zona dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa didominasi ikan berukuran besar dan sedang (Muhidin dkk, 2022). Sebaliknya, hal tersebut tidak terjadi pada nilai biomassa ikan karang yang menunjukkan penurunan di semua zona dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa (Gambar 3) (Muhidin dkk, 2022). Secara umum kondisi ikan karang di kawasan Taman Nasional Karimunjawa tidak mengalami perubahan signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019.

Disamping itu, Balai Taman Nasional Karimunjawa telah menetapkan penyu sebagai satwa prioritas berdasarkan Surat Keputusan nomor S.86/BTNKJ-1.6/2013 tentang Penetapan Satwa Prioritas Taman Nasional Karimunjawa. Kepulauan Karimunjawa merupakan habitat bagi tiga jenis penyu yaitu Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*). Bentuk nyata upaya konservasi dimulai sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini masih berjalan melalui penetasan semi alami penyu yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat. Upaya pengelolaan fauna ini sudah dilakukan secara berkesinambungan yang dimulai dengan identifikasi tempat bertelurnya hingga saat ini berada pada upaya penetasan semi alami yang berlokasi di Penetasan Semi Alami Taman Nasional Karimunjawa yang berlokasi di SPTN II Karimunjawa (SK. Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa No.SK.16/T.34/TU/KSA/01/2022 tentang Penetapan Lokasi Penetasan Semi Alami Penyu Taman Nasional Karimunjawa). Jumlah sarang yang dilaporkan oleh masyarakat pada tahun 2024 mencapai 192 sarang, dengan jumlah telur yang ditemukan dan ditetaskan sebanyak 23.384 butir telur, dengan persentase keberhasilan penetasan mencapai 36,64 %. Jumlah tukik yang berhasil di lepas dari kegiatan Penetasan Semi Alami Penyu Taman Nasional Karimunjawa di tahun 2024 berjumlah 7.144 ekor (MDI, 2024).

1.3.7 Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia di Balai Taman Nasional Karimunjawa berdasarkan data Statistik Karimunjawa Tahun 2024 adalah sebagai berikut. Pengelolaan kawasan Taman Nasional Karimunjawa didukung oleh sumber daya manusia berjumlah 97 orang yang terdiri dari 77 PNS, 5 PPPK dan 15 pegawai harian. Keadaan pegawai berdasarkan jenjang pendidikan S-3 sejumlah 2 orang, S – 2 sejumlah 14 orang, S-1/D4 sejumlah 37 orang, D3 sejumlah 7 orang, SLTA sejumlah 36 orang, SMP sejumlah 1 orang. Pegawai berdasarkan jabatan terdiri dari satu orang Eselon III , tiga orang Eselon IV, fungsional umum 20 orang, Polhut 20 orang, PEH 25 orang, Penyuluh enam orang, arsiparis tiga orang, pranata komputer satu orang, pranata keuangan APBN Mahir satu orang, Analis Pengelolaan Keuangan APBN dua orang. Sebaran pegawai berdasarkan lokasi adalah 31 orang berada di Balai, 26 orang di SPTN I Kemujan dan 25 orang di SPTN II Karimunjawa.

1.3.8 Tantangan

Tantangan adalah faktor-faktor eksternal yang dapat merugikan atau menghambat perkembangan bisnis atau individu, seperti pesaing baru, perubahan regulasi, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan memerlukan strategi untuk diantisipasi dan diminimalkan. Potensi dan tantangan dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi Balai Taman Nasional Karimunjawa diidentifikasi dan diekstraksi dari isu-isu strategis yang berkembang, baik internal maupun eksternal. Ekstraksi dari isu - isu strategis diatas, dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Penggambaran isu-isu strategis menggunakan pendekatan analisis SWOT. Rangkuti (2005) menyatakan bahwa analisis SWOT (*Strength, Weaknes, Opportunity, Threat*) merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui atau melihat kondisi Taman Nasional Karimunjawa berdasarkan faktor-faktor kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*) yang merupakan faktor internal juga kesempatan (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang merupakan faktor eksternal yang dihadapi.

Berikut penjabaran masing – masing faktor yang telah dipetakan menjadi potensi dan tantangan dari Balai Taman Nasional Karimunjawa :

A. KEKUATAN

- Peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum tetap
- Satu-satunya institusi yang melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi di Karimunjawa secara langsung
- Keanekaragaman hayati di Taman Nasional Karimunjawa lebih dari 1766 spesies
- Potensi Obyek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) dan jasa lingkungan yang besar

- Sarana prasarana pada sistem data base memadai
- Balai TN Karimunjawa memiliki sumber daya manusia, sistem penganggaran yang memadai
- Kondisi ekologi pada lima tipe ekosistem di TN Karimunjawa secara umum cenderung stabil
- Aksesibilitas menuju Kepulauan Karimunjawa semakin lancar
- Pengelolaan kawasan dilakukan secara efektif (Nilai METT lebih dari 70)
- Pemenuhan terhadap sarpras wisata alam

B. KELEMAHAN

- Pengelolaan spesies belum optimal
- Pemantauan terhadap aktivitas wisata yang mengganggu ekosistem karang belum optimal
- Penarikan PNBP belum optimal
- Kebijakan pengelolaan belum mempertimbangkan hasil penelitian
- Penanganan sampah wisata di Kawasan
- Sarana informasi di pusat informasi tidak informatif
- Penanganan terhadap invasif spesies (anjing) masih lemah
- Persepsi masyarakat terhadap kawasan menurun
- Penanganan pelanggaran hukum dalam kawasan masih membutuhkan peningkatan
- Database kondisi dan keanekaragaman hayati dan ekosistem belum optimal (hutan tropis dataran rendah dan pantai)

C. PELUANG

- Kekayaan keanekaragaman hayati dan isu lingkungan pembangunan bidang kehutanan menjadi salah satu
- Penanganan mangrove di luar kawasan mendapat dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten
- Pengolahan hasil perikanan masih terbuka
- Komitmen dan keterlibatan dari instansi terkait : pemerintah pusat, kabupaten, LSM dan perguruan tinggi
- Pengelolaan pemanfaatan air di kawasan TN Karimunjawa
- Mendorong perijinan atau kerjasama pada zona pemanfaatan
- Pengembangan produk barang/ jasa sebagai alternatif mata pencaharian
- Pemantauan kualitas air secara berkala

- Pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis gender
- Penanganan pasca tambak dengan melibatkan instansi terkait dan Masyarakat

D. TANTANGAN

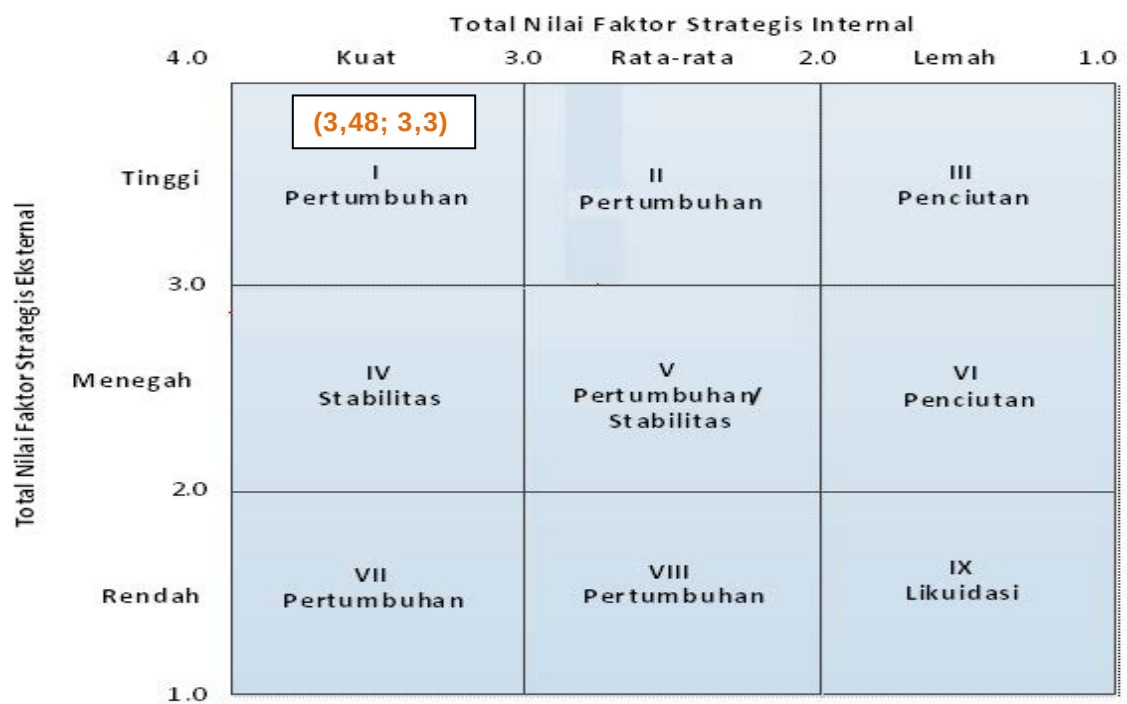
- Degradasi ekosistem terumbu karang sebagai akibat kegiatan antropogenik (wisata, tongkang, tambak)
- Penambangan pasir pada lahan yang berbatasan langsung dengan Kawasan
- Penurunan populasi spesies tertentu seperti: ikan ekor kuning, ikan ijo, kima
- Pemantauan tumbuhan dan satwa secara illegal masih berlangsung
- Pemangku kepentingan masih mengedepankan programnya sendiri (ego sektoral)
- Konflik satwa dengan masyarakat (monyet ekor panjang)
- Kebutuhan air tawar dari zona pemanfaatan dan zona rimba
- Penurunan kualitas air di dalam dan di luar kawasan TN Karimunjawa
- Reklamasi Pantai
- Degradasi lingkungan akibat pemanasan global

Isu-isu strategis yang berhasil dipetakan selanjutnya di kuantifikasi melalui skoring untuk mendapatkan analisis eksternal dan internal. Hasil analisis matrik internal-eksternal (IE) yang merupakan kegiatan penentuan arah dan sasaran pengelolaan dengan total skor matriks IFE pada sumbu X adalah 3,48 dan Matriks EFE pada sumbu Y adalah 3,3, sehingga berada di kuadran 1 pertumbuhan (Gambar 4.3). Hal ini berarti: *stakeholder* dianggap memiliki keunggulan kompetitif, sehingga organisasi perlu menerapkan strategi ekspansi (pengembangan, pertumbuhan, dan perluasan) melalui :

- 1) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di TN Karimunjawa
- 2) Penguatan kelembagaan pengelolaan TN Karimunjawa (komitmen & kultur organisasi, integritas, *achievement orientation*, *meritokrasi*);
- 3) Pengembangan jejaring kerja, integrasi program & kebijakan lintas sektor dan lintas organisasi dalam pengelolaan TN Karimunjawa

Gambar 3. Posisi Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa

9 Sel Strategi Internal Eksternal





Burung Dara Laut (Sterna sp) di Taman Nasional Karimunjawa

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

2.1.1 Visi Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**, Kementerian Kehutanan menetapkan visi menjadikan kawasan hutan sebagai **“Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini mencerminkan komitmen Kementerian Kehutanan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Kementerian Kehutanan menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan *balance scorecard*. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian Kehutanan antara lain *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process*, serta *learning and growth*.

Gambar 4. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029



Peta strategi disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit kerja di lingkup Kementerian Kehutanan untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029. Melalui peta strategi ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja, serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategi ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategi tidak hanya menjadi alat perencana dan pengukur kinerja, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan menuju tata kelola pembangunan kehutanan yang lebih lestari, inklusif, dan berkelanjutan.

2.1.2 Misi Kementerian Kehutanan

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita ke-2 yakni; ***“Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”*** menjadi landasan dalam perumusan pernyataan Misi Kementerian Kehutanan. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Kehutanan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Misi Kementerian Kehutanan yaitu:

- 1) Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
- 2) Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
- 3) Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

2.1.3 Tujuan Kementerian Kehutanan

Tujuan Kementerian Kehutanan merupakan wujud konkret dari harapan yang terkandung dalam Visi dan Misi. Tujuan ini sekaligus menjadi arah strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran strategis yang terukur dan berorientasi pada dampak. Adapun tujuan Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;
- 2) Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
- 3) Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan; serta
- 4) Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan

2.1.4 Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan, Kementerian Kehutanan menetapkan empat sasaran strategis yang merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025-2029. Keempat sasaran strategis tersebut mencerminkan integrasi antara fungsi ekologi, ekonomi, sosial, serta tata kelola kehutanan yang adaptif. Uraian sasaran strategis Kementerian Kehutanan yang menggambarkan aspek keberlanjutan dari pembangunan kehutanan adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi adalah tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan indikator kinerja penurunan laju deforestasi serta Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies (*Red List Index*);
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan indikator kinerja Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional adalah meningkatnya produk barang dan jasa dari hutan, dengan indikator kinerja nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, nilai ekspor produk kehutanan, produksi hasil hutan bukan kayu, dan nilai PNBP fungsional kehutanan; serta
- 4) Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani adalah mewujudkan layanan Kementerian Kehutanan menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.

Penjenjangan kinerja Kementerian Kehutanan yang komprehensif telah divisualisasikan secara gamblang dan lengkap melalui pohon kinerja pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029. Pohon kinerja ini menggambarkan hubungan antara visi dan misi Kementerian Kehutanan dengan tujuan, sasaran strategis, sasaran program hingga ke level kegiatan beserta indikatornya. Dokumen tersebut bahkan juga telah menggambarkan keterkaitan upaya pembangunan kehutanan dengan visi pembangunan nasional serta agenda prioritas Presiden Republik Indonesia. Pembangunan sektor kehutanan pada periode 2025-2029 diarahkan untuk berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kehutanan menetapkan arah kebijakan yang dituangkan melalui tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang terukur.

Tujuan pembangunan kehutanan dirancang untuk mencerminkan peran strategis sektor kehutanan dalam menjaga fungsi lingkungan hidup, memperkuat ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan, serta memperluas akses dan manfaat hutan bagi masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan, ditetapkan sasaran strategis sebagai gambaran kondisi yang ingin dicapai. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja yang bersifat spesifik, terukur, dan relevan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	SATUAN
Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi	Reduksi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan	15	15	16	16	17	Persen
Sasaran Strategis 1: Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Penurunan laju deforestasi	0,111	0,106	0,102	0,098	0,094	Juta Ha
	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancam Spesies	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76	Poin

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	SATUAN
Tujuan 2: Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan	Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya	25	30	40	60	75	Persen
Sasaran Strategis 2: Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat sekitar hutan	2.810	3.171	3.532	3.893	4.254	Miliar Rupiah
Tujuan 3: Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional	Persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto sub sektor kehutanan	1,5	1,8	2,4	3	3,4	Persen
Sasaran Strategis 3: Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	Nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan	134,74	136,19	139,64	142,09	146,54	Triliun Rupiah
	Nilai ekspor produk kehutanan	15,4	15,82	16,23	16,64	17,05	Miliar USD
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong)	450	500	550	600	650	Ribu Ton
	Nilai PNBP Fungsional Kehutanan	7,72	8,29	8,86	9,42	9,99	Triliun Rupiah

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	SATUAN
Tujuan 4: Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani	Nilai Reformasi Birokrasi	80,31	81,65	82,67	83,65	83,70	Poin
Sasaran Strategis 4: Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	Poin

Pada delapan indikator sasaran strategis Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian enam indikator sasaran strategis, walaupun secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap pencapaian seluruh indikator sasaran strategis. Dalam rangka mencapai sasaran strategis, Kementerian Kehutanan melaksanakan tiga program dengan masing-masing sasaran program. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program, pada setiap sasaran program ditetapkan indikator kinerja program yang diampu oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I.

2.2 Visi, Misi dan Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE

2.2.1 Visi Direktorat Jenderal KSDAE

Mandat pengelolaan keanekaragaman hayati oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029 mengusung tema ***“Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”***. Tema tersebut sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029, serta visi, misi, dan strategi pembangunan kehutanan pada periode yang sama. Tema tersebut juga merupakan pengejawantahan dari tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati, baik yang termuat dalam World Conservation Strategy, Convention on Biological Diversity, maupun amanat dalam Undang-Undang Konservasi Hayati (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024).

Walaupun tema tersebut terkesan seperti sebuah paradoks, namun kontradiksi pada upaya mencegah kepunahan dan mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat disangkal dengan visualisasi yang jelas pada penjenjangan strategi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE. Memang telah menjadi aksioma bahwa percepatan kepunahan keanekaragaman hayati terutama disebabkan oleh upaya pemanfaatan yang berlebihan, namun jika upaya pemanfaatan dilakukan dengan tata kelola yang baik maka hal tersebut dapat memberikan dampak yang sebaliknya (*boomerang effect*). Pemanfaatan keanekaragaman hayati pada dasarnya dapat berfungsi sebagai titik unkit pelestarian keanekaragaman hayati, karena menurut Pudyatmoko (2024) keberhasilan konservasi keanekaragaman hayati sangat bergantung pada kesejahteraan dan tingkat pendidikan masyarakat. Apabila manfaat dari potensi keanekaragaman hayati dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maka saat itu pula mereka akan ikut menjaga sumber-sumber perekonomian dan kesejahteraan tersebut. Sinclair *et al* (2006) juga menyampaikan bahwa salah satu dari empat upaya pengelolaan populasi satwa liar adalah pemanenan yang perlu dilakukan agar populasi berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Kehutanan dan sejalan dengan tema tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan visi ***“Keseimbangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial”***. Visi tersebut menggambarkan komitmen untuk mencapai tujuan utama dari upaya konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai panduan umum yang memberikan arah bagi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Direktorat Jenderal KSDAE beserta jajarannya.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE tersebut mencerminkan mandat pengelolaan keanekaragaman hayati sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati. Visi tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana *Outcome Document* yang dihasilkan dalam konferensi Rio+20 pada tahun 2012 yang berjudul “*The Future We Want*”, atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals*.

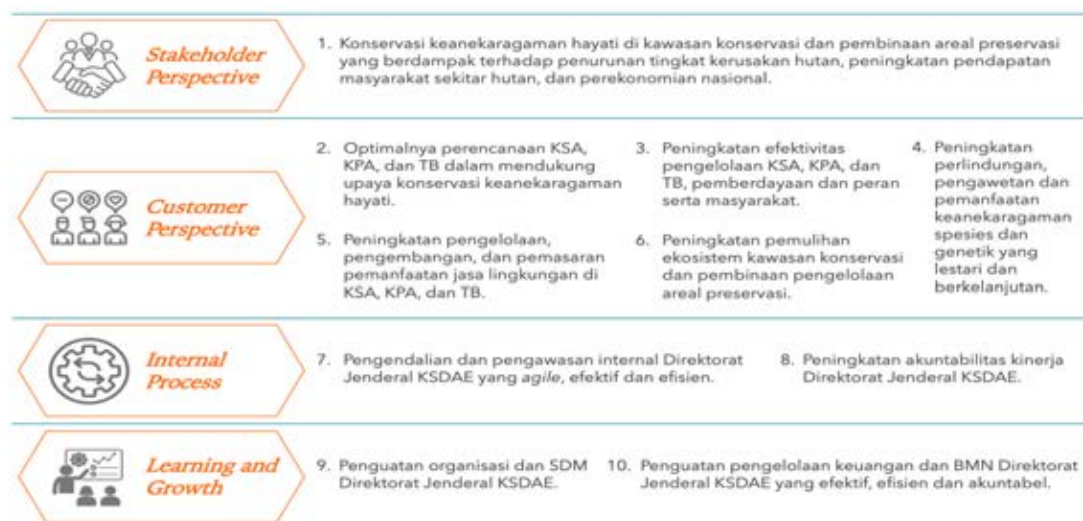
Penjelmaan visual dan konseptual dari visi di atas dapat dilihat pada peta strategi pembangunan Direktorat Jenderal KSDAE. Peta strategi tersebut merupakan visualisasi dari target-target utama yang ingin dicapai, termasuk dalam hal perbaikan tata kelola (*internal process* serta *learning and growth*). Peta strategi Direktorat Jenderal KSDAE merupakan pedoman utama bagi seluruh unsur dan unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, agar dapat menjamin keterpaduan arah, keselarasan strategi, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran program.

2.2.2 Misi Direktorat Jenderal KSDAE

Serangkaian tindakan atau langkah konkret yang dirancang oleh Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai visi di atas diuraikan menjadi empat misi. Misi tersebut memberikan arah dan fokus pada kegiatan jangka menengah seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE. Bertalian dengan misi Kementerian Kehutanan, maka Misi Direktorat Jenderal KSDAE dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menjaga kelestarian fungsi ekologis keanekaragaman hayati;
- 2) Mengoptimalkan fungsi sosial keanekaragaman hayati;
- 3) Meningkatkan manfaat ekonomi keanekaragaman hayati; serta
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang konservasi keanekaragaman hayati yang baik

Gambar 5. Peta Strategi Pembangunan KSDAE Tahun 2025-2029



2.2.3 Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE

Pada tabel berikut diuraikan sasaran program dan indikator kinerja program yang diampu oleh Direktorat Jenderal KSDAE.

Tabel 6. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen KSDAE

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program 1: Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i>	Spesies (Kumulatif)	5	15	25	35	50
	Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i>	Spesies (kumulatif)	3	8	15	30	50
Sasaran Program 2: Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Miliar Rupiah	200	210	220	230	240
Sasaran Program 3: Meningkatnya produk barang dan jasa dari	Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i>	Triliun Rupiah	7,75	7,80	8,00	8,20	8,40

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Miliar Rupiah	235	241,5	249	257,5	267

2.2.4 Identifikasi Resiko Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE

Risiko yang mungkin terjadi untuk mencapai sasaran program dan indikator kinerja program perlu diidentifikasi dengan cermat agar dapat diupayakan langkah-langkah mitigasinya. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi agar apa yang direncanakan dapat terwujud dengan capaian yang memadai. Berikut diuraikan pemetaan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam upaya pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE beserta upaya mitigasinya.

SASARAN PROGRAM 1

Resiko yang mungkin terjadi dan upaya mitigasi dalam mencapai sasaran “meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati” adalah sebagai berikut:

1. REVIU DAN PUBLIKASI HASIL ASESMEN KETERANCAMAN SPESIES.

Proses reviu dan publikasi hasil asesmen status keterancaman spesies secara nasional terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama, dan hal ini tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah Indonesia. Hasil evaluasi status keterancaman spesies secara nasional hanya akan terpublikasi pada sistem database IUCN *Red List* (diperhitungkan dalam formula *Red List Index*) apabila telah mendapat reviu dan persetujuan dari tim pakar yang disediakan oleh IUCN *Species Survival Commission* (IUCN SSC). Proses yang membutuhkan waktu lama ini dapat saja menghambat pencapaian target RLI Indonesia sebesar 0,76 pada tahun 2029. Sebagai contoh, 11 spesies dari marga *Macaca* yang telah diajukan hasil evaluasinya sejak tahun 2024, hingga saat ini belum diterbitkan oleh IUCN. Saat ini, Indonesia telah mengajukan hasil asesmen terhadap 876 spesies (primate burung,

amphibi, anggrek dan babi endemik Sulawesi), dan belum mendapat persetujuan untuk publikasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) sebanyak mungkin melakukan asesmen terhadap status keterancaman spesies jika sumber daya tersedia, terutama terhadap 1.515 spesies satwa liar di Indonesia yang saat ini masih berstatus *Data Deficient* (DD); (b) asesmen status keterancaman spesies akan lebih baik jika dilakukan oleh anggota IUCN SSC yang merupakan anggota *Indonesian Species Survival Group* (id-SSG); (c) mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen keterancaman spesies kepada para pakar spesies yang bekerja pada BRIN beserta koleganya yang merupakan anggota IUCN SSC; serta (d) Pemerintah Indonesia secara intensif melakukan korespondensi dengan IUCN SSC untuk percepatan revidasi dan publikasi.

2. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SAAT EL NINO.

Kebakaran hutan yang disebabkan dan/atau diperparah oleh daya-daya alam seperti *El Nino* dapat terjadi secara massif pada tahun 2027. Fenomena 5 tahunan ini selalu menimbulkan kebakaran pada areal yang cukup luas di Indonesia, terutama pada tahun 1997. Kebakaran hutan dan lahan yang massif akan menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun, dan berdampak pada banyak hal, termasuk terhadap kondisi perekonomian dan kesejahteraan sosial (terutama kesehatan). Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) peningkatan kapasitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada kondisi *El Nino* (SDM, sarana dan prasarana, serta pembiayaan); (b) penyebarluasan informasi dan penyadartahuan upaya mitigasi bahaya kebakaran hutan dan lahan secara massif kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi; (c) aktif mengkoordinasikan kondisi kebakaran hutan dan lahan kepada pihak-pihak terkait; serta (d) melakukan upaya modifikasi cuaca apabila sangat diperlukan, dengan berkoordinasi kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, BMKG, serta pihak lain yang memiliki kapasitas sumber daya.

3. EFEKTIVITAS SISTEM PERLINDUNGAN KAWASAN KONSERVASI.

Sistem perlindungan kawasan konservasi, terutama upaya preventif (patroli dan penjagaan kawasan) terkadang dapat saja menjadi tidak efektif dalam menekan tingkat gangguan tertentu pada kawasan konservasi. Dalam banyak kasus, hal ini terkadang dapat terjadi di banyak kawasan konservasi. Sistem perlindungan kawasan konservasi yang tidak efektif dapat menyebabkan percepatan degradasi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) menerapkan upaya preventif

dalam perlindungan kawasan secara tersistem, berbasis spasial, dan informasinya dapat dipantau serta dianalisis secara *near real time*. *Spatial Monitoring and Reporting Tool* (SMART) adalah salah satu perangkat lunak yang efektif dalam mendukung upaya ini. Analisis dari data yang tersimpan di dalam sistem dapat dengan mudah dan cepat dilakukan. Saat ini, 53 dari 74 UPT Direktorat Jenderal KSDAE telah menggunakan SMART dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasinya di lapangan. Sampai dengan tahun 2029, akan diupayakan agar seluruh UPT dapat menggunakan SMART; (b) menerapkan *Integrated Prevention Model* (IPM) dalam upaya menekan tingkat gangguan kawasan konservasi di seluruh UPT Direktorat Jenderal KSDAE. IPM merupakan sebuah sistem yang dikembangkan oleh kepolisian di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mengintervensi akar penyebab dari masalah kejahatan tersebut. Di Indonesia, IPM telah diadopsi dan terbukti efektif dalam menekan tingkat gangguan kawasan konservasi di TN Way Kambas dan TN Gunung Leuser; serta (c) peningkatan kapasitas perlindungan kawasan konservasi (SDM, sarana dan prasarana, serta pembiayaan);

4. BENCANA GEOLOGI YANG BERDAMPAK PADA DEGRADASI EKOSISTEM.

Bencana-bencana geologi seperti erupsi gunung berapi dan tanah longsor berdampak secara langsung dan signifikan terhadap degradasi ekosistem, sehingga akan menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) menerapkan standar-standar evakuasi dan penyelamatan satwa liar saat kejadian bencana alam; serta (b) melakukan upaya pemulihan ekosistem secara massif pada wilayah-wilayah terdampak.

5. PERCEPATAN PENINGKATAN POPULASI MANUSIA.

Percepatan peningkatan populasi manusia di wilayah-wilayah sekitar kawasan konservasi serta peningkatan standar hidup manusia akan berkorelasi terhadap peningkatan kebutuhan sumber-sumber perekonomian. Apabila tidak ditunjang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang memadai, maka cara instan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat adalah dengan upaya ekstraktif terhadap sumber daya yang tersedia di dalam kawasan konservasi. Kondisi ini terkadang sulit untuk dapat dikendalikan, dan terkadang pula tidak dapat diimbangi oleh kemampuan suksesi alami dari keanekaragaman hayati. Sebuah aksioma: ekstraksi potensi keanekaragaman hayati secara berlebihan dan tidak terkontrol, secara pasti akan berdampak pada degradasi ekosistem, sehingga akan menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) mengoptimalkan upaya perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi; (b) mengoptimalkan pembinaan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi;

serta (c) mengintervensi tingkat pendidikan masyarakat di sekitar kawasan, salah satunya dengan mendorong agar anak-anak yang hidup di sekitar kawasan dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMK Kehutanan) dengan persyaratan yang dimudahkan.

6. TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENCADANGAN AREAL PRESERVASI.

Konsep dan kerangka kerja areal preservasi, sebagaimana yang saat ini masih sedang dalam proses penyusunan (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Areal Preservasi), belum dipahami dengan baik oleh para pihak. Sebagian besar masyarakat, pemangku lahan/kawasan, pelaku usaha, bahkan pejabat pemerintah, masih beranggapan bahwa areal preservasi adalah kawasan konservasi. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa pencadangan areal preservasi menyebabkan lahan budi daya yang dikelola akan beralih fungsi menjadi kawasan konservasi, bahkan akan berubah statusnya menjadi *state property*. Hal tersebut berpotensi menjadi faktor penghambat pencapaian target pencadangan areal preservasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) mempercepat penyelesaian RPP Areal Preservasi dengan proses konsultasi publik yang massif; (b) melakukan diseminasi informasi terkait areal preservasi pada berbagai wahana yang dapat menjangkau banyak kalangan secara luas dengan biaya yang rendah; serta (c) melakukan uji coba pada beberapa *pilot project* pencadangan areal preservasi. Uji coba pada masa awal ini sebaiknya dilakukan pada wilayah-wilayah yang dulunya merupakan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan efektif berfungsi sebagaimana kawasan ekosistem esensial.

SASARAN PROGRAM 2

Risiko yang mungkin terjadi dan upaya mitigasi dalam mencapai sasaran “meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga” adalah sebagai berikut :

1. PENGUNGKAPAN NILAI TRANSAKSI EKONOMI.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan usaha ekonominya, terkadang akan terjadi keengganan beberapa anggota masyarakat untuk mengungkapkan nilai transaksi ekonomi hasil dari pembinaan usaha ekonominya secara terbuka. Kondisi ini akan berpengaruh pada bias hasil perhitungan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) melakukan perhitungan nilai transaksi ekonomi melalui survei yang terbimbing dan *in-depth interview*. Metode survei sosial dengan wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif yang efektif dalam meminimalkan bias perhitungan, karena metode ini menekankan

fleksibilitas untuk menggali informasi yang tidak terduga, membangun suasana nyaman, dan menggunakan teknik probing untuk mendapatkan data yang lengkap dan bernuansa; serta (b) perhitungan nilai transaksi ekonomi dilakukan dengan metode alternatif tertentu yang melibatkan asumsi-asumsi harga atas kuantitas produk yang dihasilkan atau dimanfaatkan. Survei tidak secara langsung dilakukan terhadap nilai transaksi ekonomi melainkan berbasis pada kuantitas barang dengan asumsi harga pasaran.

2. PEMAHAMAN ATAS NILAI TRANSAKSI EKONOMI.

Nilai transaksi ekonomi, mungkin adalah hal yang baru bagi para pelaku kegiatan pemberdayaan masyarakat di lapangan. Pemahaman dan pemaknaan terkait cara perhitungan nilai transaksi ini mungkin saja masih sangat beragam. Dalam pemberian akses pemanfaatan kawasan konservasi, potensi kawasan yang dimanfaatkan terkadang dilakukan secara subsisten, tidak untuk diperdagangkan secara komersial. Namun demikian, pemanfaatan secara subsisten tersebut juga harus tetap disubstitusi menjadi nilai transaksi ekonomi. Terkadang pula, potensi yang dimanfaatkan bukan merupakan produk akhir yang dipasarkan, sehingga sulit untuk menghitung nilainya secara akurat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan yaitu memberikan pedoman dan arahan yang jelas bagi para pelaku kegiatan di lapangan, terutama bagi para penyuluh kehutanan di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Direktorat Konservasi Kawasan perlu menerbitkan pedoman pelaksanaan perhitungan nilai transaksi ekonomi dari pemberian akses pemanfaatan kawasan, maupun dari kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi.

SASARAN PROGRAM 3

Resiko yang mungkin terjadi dan upaya mitigasi dalam mencapai sasaran “meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem” adalah sebagai berikut:

1. KEBOCORAN PENERIMAAN NEGARA.

Kebocoran penerimaan negara dari upaya pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sangat mungkin terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) dari waktu ke waktu, perlu terus dilakukan perbaikan sistem tata kelola pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, dengan menyesuaikan dengan kondisi serta kemajuan teknologi; (b) menerapkan sistem *cashless payment*; (c) dalam pengelolaan wisata alam, secara perlahan menerapkan sistem tiket pengunjung secara daring (*e-ticketing*), sehingga tidak

terjadi pemalsuan tiket pada pintu-pintu masuk obyek wisata alam; serta (d) meningkatkan pengawasan dan pengendalian dengan memanfaatkan teknologi digital yang tersedia.

2. *POTENTIAL LOSS.*

Dalam pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, besar kemungkinan dapat terjadi *potential loss* penerimaan negara. Hal tersebut dapat disebabkan oleh sistem tata kelola yang kurang memadai. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kehutanan secara berkala dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama (1-2 tahun) mengingat penurunan nilai mata uang akibat inflasi; serta (b) melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkala dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama (1-2 tahun). Penyesuaian patokan harga tersebut harus didasarkan atas perhitungan nilai intrinsik keanekaragaman hayati.

2.3 Visi, Misi dan Sasaran Kegiatan Balai Taman Nasional Karimunjawa

2.3.1 Visi Balai Taman Nasional Karimunjawa

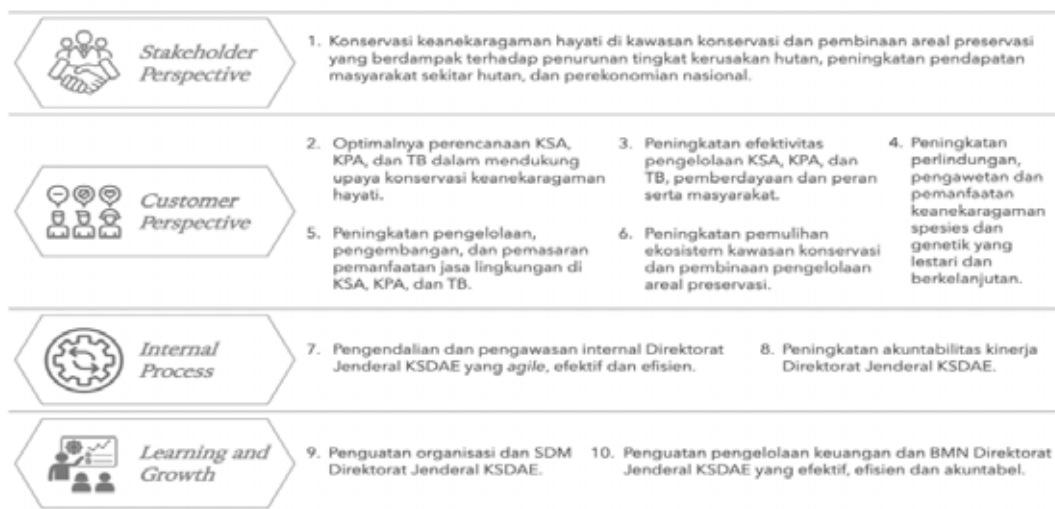
Dalam rangka mendukung visi Kementerian Kehutanan dan visi Direktorat Jenderal KSDAE, Balai Taman Nasional menjadi salah satu punggawa dalam pengelolaan kawasan dengan berpegang pada upaya konservasi menetapkan visi **“Menjadi Kawasan dengan Keanekaragaman Ekosistem yang Utuh untuk Pemanfaatan Wisata Berkelanjutan”**. Visi tersebut menggambarkan komitmen untuk mencapai tujuan utama dari upaya konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai panduan umum yang memberikan arah bagi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa. Visi tersebut mencerminkan mandat pengelolaan keanekaragaman hayati sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2.3.2 Misi Balai Taman Nasional Karimunjawa

Serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk mencapai sebuah visi dan atau merupakan penjabaran dari visi itu sendiri serta berperan untuk menjalankan mandat organisasi adalah merupakan misi suatu organisasi. Balai Taman Nasional Karimunjawa memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Menjaga keutuhan kawasan hutan;
- 2) Membangun database kondisi dan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan tropis dataran rendah dan pantai;
- 3) Menjaga keutuhan kawasan mangrove;
- 4) Membangun database kondisi lingkungan fisik hutan mangrove;
- 5) Memperkecil kerusakan terumbu karang;
- 6) Memulihkan ekosistem terumbu karang;
- 7) Menjamin tidak adanya perusakan objek daya tarik wisata; serta
- 8) Menjamin pengurangan sampah di objek wisata

Gambar 6. Peta Strategi Pembangunan Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2025-2029



2.3.3 Sasaran Kegiatan Balai Taman Nasional Karimunjawa

Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan diturunkan menjadi Sasaran Strategis Direktorat Jenderal KSDAE yang kemudian diteruskan menjadi Sasaran Kegiatan di tingkat Unit Pelaksana Teknis. Masing-masing sasaran memiliki indikator dari target yang ditetapkan. Target yang harus dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU), target untuk program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berupa Indikator Kinerja Program (IKP) sementara target yang harus dicapai untuk masing-masing kegiatan di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Peta sasaran program dan sasaran kegiatan (*cascading*) secara umum ditampilkan pada lampiran 1. Adapun sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan di Balai Taman Nasional Karimunjawa pada tabel 7.

Tabel 7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2025 - 2029

NO	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
	Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik						
	SP1.SK1 Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetic						
	SP1.SK1.1 Jumlah spesies yang terdata sebaran	Spesies (Kumulatif)	5	10	15	20	25

NO	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	dan/atau populasinya						
	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru						
	SP2.SK2 Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat						
	SP2.SK2.1 Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	0	0	1	1	1
	SP3.SK2 Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan						
	SP3.SK2.1 Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>cashless payment</i> (basis data = 580 pintu masuk)	Persen (%)	-	3	3	3	3
	SP3.SK2.2 Nilai PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Miliar (Rupiah)	1,535363	1,03448	1,89857	1,676263	1,726563
	Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi						
	SP1.SK3 Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi						
	SP1.SK3.2 Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	1	5	5	5	5
	Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati						
	SP1.SK2 Optimalnya Perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem						
	SP1.SK2.1 Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,8	-	-	-	-
	SP1.SK2.2 Presentase entitas	Persen (%)	20	20	20	20	20

NO	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel						
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru						
	SP1.SK4 Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB						
	SP1.SK4.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit	-	1	-	1	-
	SP2.SK1 Meningkatnya keterlibatan Masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati						
	SP2.SK1.1 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (kumulatif)	3	4	4	4	4
	Program Dukungan Manajemen						
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem						
	SK1 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas						
	SK1.1 <i>Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</i>	Poin	3,90	3,92	3,94	3,97	4,00
	SK2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem						
	SK1.2 <i>Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</i>	Poin	87,49	87,69	87,89	88,09	88,29

2.3.4 Tonggak Pencapaian (*Milestone*) Pembangunan

Balai Taman Nasional Karimunjawa merupakan bagian dari Direktorat Jenderal KSDAE secara sekuensial serta berjenjang mengikuti target capaian Kementerian Kehutanan. Pembangunan kehutanan 2025-2029 diarahkan pada pengembangan bioekonomi berbasis hutan dan dekarbonisasi dari sektor hutan, dengan rancangan pemenuhan tonggak pencapaian (*milestone*) untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- 1) **Tahun 2025:** Peningkatan produksi hasil hutan untuk pemerataan pembangunan ekonomi wilayah dengan indikator keberhasilan yaitu konsolidasi para pihak dan implementasi kelembagaan Balai Taman Nasional Karimunjawa semakin kuat untuk mendorong peningkatan produksi;
- 2) **Tahun 2026:** Aktualisasi hutan untuk pangan, energi dan sumber daya air serta hilirisasi produk hutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah dengan indikator keberhasilan laju deforestasi semakin dapat dikonsolidasikan, akses kelola masyarakat berangsur merata, hilirisasi mulai digalakkan, dan upaya digitalisasi mulai terlihat melalui *cashless payment*;
- 3) **Tahun 2027:** Intensifikasi agroforestri untuk memperkuat konsolidasi kemajuan dan kemandirian wilayah dengan indikator keberhasilan gangguan keamanan hutan semakin berkurang untuk mendukung dan menjaga habitat spesies terancam punah;
- 4) **Tahun 2028:** Ketahanan pangan dan energi dari pengelolaan hutan lestari untuk pembangunan bioekonomi dan reduksi emisi dengan indikator keberhasilan intensifikasi agroforestri sudah mulai mendorong kemajuan dan kemandirian desa, serta derajat kepuasan masyarakat terhadap layanan semakin meningkat;
- 5) **Tahun 2029:** Bioekonomi hutan untuk transformasi pertumbuhan ekonomi dengan indikator keberhasilan tingkat keterancaman spesies semakin menurun, ketahanan pangan sudah memiliki bukti dalam upaya peningkatan kemajuan dan kemandirian desa, serta bioekonomi sudah mulai terlihat mendorong pengembangan ekonomi wilayah.



Menara Pandang untuk Pengamatan Burung di Trekking Mangrove - Kemujan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Amanat RPJPN ini selanjutnya menjadi dasar perumusan visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang pemenuhannya dicapai melalui delapan misi, atau lebih dikenal dengan Asta Cita. Asta Cita dimaksud yaitu: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pembangunan nasional 2025-2029, Asta Cita dikenal sebagai Prioritas Nasional (PN), yang merupakan struktur pokok seluruh rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Adapun dukungan utama Kementerian Kehutanan terhadap Prioritas Nasional Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 tercermin secara langsung pada Prioritas Nasional 2. Namun demikian, Kementerian Kehutanan juga terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan Prioritas Nasional 4, 5, 6, dan 8. Dalam pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang masing-masing memiliki sasaran terukur.

Sasaran pembangunan nasional 2025-2029 adalah: (1) meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan antara lain

pertumbuhan ekonomi menuju 8% dan *Gross National Income* (GNI) per kapita berada pada angka US\$8.000; (2) kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional meningkat, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan adalah peringkat *Global Power Index* pada angka 29; (3) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan antara lain tingkat kemiskinan turun menjadi 4,5-5 persen, dan rasio gini turun menjadi 0,372-0,375; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan adalah indeks modal manusia meningkat menjadi 0,59; (5) intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan yaitu penurunan intensitas emisi GRK sebesar 45,17% dan indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 77,20.

Pembangunan nasional 2025-2029 menekankan strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan sebagai kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional. Strategi menurunkan tingkat kemiskinan ditempuh setidaknya dengan: (1) memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bertujuan untuk memastikan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Langkah penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi prioritas disertai langkah menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat; (2) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan; (3) meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja; dan (4) memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.

Strategi kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang akan dijalankan dan bertumpu pada: (1) pemenuhan layanan dasar, yang mencakup pelayanan kesehatan, jaminan gizi, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, perlindungan sosial, dan perlindungan dari kekerasan; (2) pembangunan modal manusia yang mencakup pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, pelatihan vokasi dan kewirausahaan, literasi dan kecakapan hidup, dan pembudayaan prestasi olah raga; dan (3) pembangunan modal sosial budaya, yang mencakup agama, kebudayaan, pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, dan keluarga dan pengasuhan. Ketiga titik tumpu ini selanjutnya ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang.

Strategi ketiga adalah mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Strategi ini akan ditempuh dengan upaya: (1) peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada

pangan; (2) industrialisasi (hilirisasi), padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan; (3) pariwisata dan ekonomi kreatif; (4) ekonomi biru dan ekonomi hijau; (5) perkotaan sebagai usat pertumbuhan ekonomi; (6) transformasi digital; (7) investasi berorientasi ekspor dan investasi non APBN; (8) konservasi sumber daya air; serta (9) produktivitas belanja negara. Pengungkit utama dari strategi mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan adalah deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter *pro-growth*. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga merupakan kontribusi dari pertumbuhan ekonomi wilayah, dan dengan demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci dan faktor pendorong.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan

Pembangunan kehutanan 2025-2029 utamanya diarahkan untuk mengisi prioritas nasional kedua “memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”. Sasaran utama pada prioritas nasional kedua yang didukung oleh Kementerian Kehutanan adalah meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan *nexus* pangan, energi, air, dan terwujudnya transformasi ekonomi hijau. Selain itu, Kementerian Kehutanan mendukung prioritas nasional keempat “memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas”, dengan sasaran utama yang didukung adalah terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata. Prioritas Nasional keenam “membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” dengan sasaran utama yang didukung adalah mewujudkan pembangunan kemandirian pedesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan juga mendukung sasaran utama pada prioritas nasional kedelapan “Memperkuat penyelarasan kehidupan alam yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur” dengan sasaran utama yang didukung adalah resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Isu utama dari sasaran prioritas nasional kedua adalah kehilangan keanekaragaman hayati serta pengelolaan kawasan hutan yang belum mendukung penguatan ekosistem usaha dan pengentasan kemiskinan. Intervensi untuk mengatasi isu yang ada dan memenuhi kinerja pembangunan kehutanan diarahkan pada pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Intervensi untuk pelestarian keanekaragaman hayati antara lain akan diwujudkan melalui: (1) perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi; (2) pengurangan ancaman kepunahan spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan; (3) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (4) pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan mendukung bioekonomi; serta (5) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik.

Pengelolaan hutan lestari mengarahkan intervensi untuk pemanfaatan sumber daya hutan sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi. Dengan demikian transformasi kebijakan pengelolaan hutan lestari meliputi: (1)

peningkatan produktivitas hutan; (2) pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri; (3) penguatan pengelolaan hutan lestari; (4) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari; (5) peningkatan fungsi sosial kawasan hutan; serta (5) perlindungan dan pengamanan hutan. Kebutuhan intervensi tersebut diterjemahkan lebih lanjut menjadi arah kebijakan. Kementerian Kehutanan merumuskan kebijakan pembangunan tahun 2025- 2029, yaitu: (1) pemantapan kawasan hutan; (2) konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (3) peningkatan daya dukung daerah aliran sungai; (4) pengelolaan hutan lestari dan peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan industrialisasi hasil hutan; (5) peningkatan akses kelola hutan yang berkeadilan; (6) perlindungan dan pengamanan hutan; (7) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan; serta (8) peningkatan tata kelola dan pengendalian internal.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian Kehutanan juga berfokus pada kebijakan dan strategi dalam pengurusan kawasan hutan, yang berpijak pada prinsip transparansi, keadilan dan keberlanjutan. Adapun kebijakan dan strategi Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

1) *Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air.*

Termasuk di dalamnya perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi lahan kritis serta pengendalian deforestasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menurunkan emisi karbon dan menjawab krisis iklim dengan strategi yang akan ditempuh antara lain: (a) melindungi wilayah hulu DAS dan pesisir di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi; (b) menjaga keanekaragaman hayati utamanya kekayaan spesies kebanggaan Indonesia; (c) memulihkan hutan berstatus kritis melalui upaya rehabilitasi hutan, termasuk di dalamnya menurunkan erosi dan aliran permukaan melalui bangunan sipil teknis; serta (d) mengantisipasi dan menurunkan kejadian kebakaran hutan di provinsi rawan kebakaran hutan.

2) *Penguasaan hutan yang berkeadilan.*

Kementerian membuka ruang bagi masyarakat adat dan lokal yang selama ini tersisih dengan memberikan akses legal dan perlindungan hukum atas hutan yang secara historis jadi bagian dari identitas dan penghidupan mereka. Strategi yang akan dijalankan untuk mendukung kebijakan ini adalah: (a) penyelesaian kasus sawit ilegal dan kawasan terbangun lainnya di kawasan hutan; (b) penertiban izin pemanfaatan kawasan hutan, utamanya terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tidak aktif di lapangan; serta (c) audit dan pemberlakuan sanksi bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA) utamanya dalam pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3) *Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air.*

Melalui pendekatan agroforestri, kawasan hutan dikelola untuk menghasilkan pangan secara lestari, seperti tanaman aren, dan HHBK lainnya bersama pepohonan hutan, menjaga ekosistem sekaligus menyediakan pangan dan ekonomi dengan strategi: (a) penyediaan lahan untuk *food estate* (lumbung pangan) baik dalam skala besar, menengah maupun kecil; (b) perhutanan berbasis masyarakat untuk mendukung ketersediaan dan keragaman pangan lokal; serta (c) peningkatan multi usaha kehutanan untuk mendukung pangan dan hilirisasi aren.

4) *One Map Policy.*

Seluruh aktivitas pemetaan kehutanan akan disatukan secara nasional dengan strategi melakukan integrasi informasi geospasial tematik dan pemantauan hutan nasional melalui sistem informasi "jaga rimba". Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dan konflik lahan sekaligus memperkuat dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data yang akurat.

5) *Digitalisasi layanan kehutanan.*

Digitalisasi layanan merupakan salah satu bentuk modernisasi tata kelola hutan, dengan strategi yang dilakukan: (a) digitalisasi seluruh layanan Kementerian Kehutanan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di tingkat tapak; (b) penguatan infrastruktur pusat data dan pembangunan pusat data yang terstandardisasi; serta (c) penerapan *cashless payment* dan *e-ticketing* pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan suaka margasatwa. Melalui sistem digital, masyarakat diharapkan dapat mengakses data dan perizinan dengan lebih mudah dan transparan. Proses yang dulunya panjang dan rawan penyimpangan diharapkan dapat dipangkas menjadi efisien dan akuntabel.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mengintegrasikan pengarusutamaan pembangunan dalam kebijakan dan strategi sektor kehutanan, Kementerian Kehutanan menerapkan lima pendekatan utama dalam pembangunan, yaitu gender, inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan pembangunan rendah karbon. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sektor kehutanan diharapkan dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk menggambarkan dan menginternalisasi arahan pembangunan nasional dan kebijakan Kementerian Kehutanan, terdapat empat transformasi utama pembangunan kehutanan 2025- 2029, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi kehutanan; (2) pengelolaan

keanekaragaman hayati; (3) hutan cadangan pangan, energi dan air; serta (4) hilirisasi kayu log, getah pinus dan bioethanol.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal KSDAE

Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 dirancang secara presisi untuk menempatkan dan mengarahkan peran strategis sektor kehutanan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional serta tujuan pembangunan berkelanjutan global. Target pembangunan nasional 2025-2029 adalah sebagaimana diuraikan dalam Asta Cita dan telah dibahas sebelumnya. *The 17 Goals of Sustainable Development* (SDGs) dapat dipahami secara cepat melalui dua kerangka utamanya, yaitu model 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership*) yang digunakan secara global, serta empat pilar yang diadopsi oleh Indonesia. Ke-17 tujuan SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar untuk mempermudah pelaksanaannya di tingkat nasional, yaitu: (1) pilar pembangunan sosial; (2) pilar pembangunan ekonomi; (3) pilar pembangunan lingkungan; serta (4) pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Keempat pilar tersebut koheren dan seiring dengan 4 pernyataan misi, 4 tujuan, 4 sasaran strategis, dan 8 indikator sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam periode 2025-2029.

Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mengupayakan pencapaian seluruh pilar tujuan pembangunan berkelanjutan. Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian seluruh tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan secara berjenjang dan bertalian. Namun demikian, Direktorat Jenderal KSDAE hanya akan berperan secara langsung pada dua prioritas nasional, walaupun secara tidak langsung akan berperan dalam pencapaian lima prioritas nasional sebagaimana diuraikan dalam rumusan Asta Cita. Secara langsung, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian empat dari delapan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8. Intervensi Direktorat Jenderal KSDAE dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan

NO	INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN	INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KSDAE
Prioritas Nasional 2:		
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.		
1.	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancamannya sebesar 0,76 poin.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i> sebanyak 50 spesies.

NO	INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN	INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KSDAE
		Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i> sebanyak 50 spesies.
2.	Nilai ekspor produk kehutanan sebesar 17,05 Millar USD.	Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i> sebesar Rp. 8,4 Triliun.
3.	Nilai PNBP Fungsional Kehutanan sebesar Rp. 9,99 Triliun.	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan sebesar Rp. 267 Miliar
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.		
4.	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan Rp. 4,25 Triliun.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB sebesar Rp 240 Miliar.

3.4 Arah dan Kebijakan Strategis Balai Taman Nasional Karimunjawa

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka arah kebijakan prioritas Balai Taman Nasional Karimunjawa pada unit kerja di atasnya. Hal tersebut untuk menjamin keterkaitan kebijakan Kementerian Kehutanan dengan kebijakan Unit Pelaksana Teknis. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional merupakan kompilasi dari kegiatan di pusat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan taman nasional sebagaimana tersaji pada tabel 9.

Tabel 9. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2025 – 2029

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
	Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik						
	SP1.SK1 Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetic						
	SP1.SK1.1 Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	5	10	15	20	25
	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru						
	SP2.SK2 Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat						
	SP2.SK2.1 Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	0	0	1	1	1
	SP3.SK2 Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan						
	SP3.SK2.1 Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless	Persen (%)	-	3	3	3	3

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	<i>payment</i> (basis data = 580 pintu masuk)						
	SP3.SK2.2 Nilai PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Miliar (Rupiah)	1,535363	1,03448	1,89857	1,676263	1,726563
	Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi						
	SP1.SK3 Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi						
	SP1.SK3.2 Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	0,01	0,18	5	5	5
	Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati						
	SP1.SK2 Optimalnya Perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem						
	SP1.SK2.1 Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,8	-	-	-	-
	SP1.SK2.2 Presentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen (%)	20	20	20	20	20
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru						
	SP1.SK4 Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB						
	SP1.SK4.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit	-	1	-	1	-
	SP2.SK1 Meningkatnya keterlibatan Masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati						

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	SP2.SK1.1 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (kumulatif)	3	4	4	4	4
	Program Dukungan Manajemen						
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem						
	SK1 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas						
	SK1.1 <i>Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</i>	Poin	3,90	3,92	3,94	3,97	4,00
	SK2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem						
	SK1.2 <i>Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</i>	Poin	87,49	87,69	87,89	88,09	88,29

Isu utama dalam upaya pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati serta sasaran dan indikator kinerja pada Balai Taman Nasional Karimunjawa diuraikan sebagai berikut:

1. INDEKS EFEKTIVITAS PERENCANAAN KSA/KPA/TB

Perencanaan KSA, KPA, TB merupakan prakondisi pemungkin (*enabling condition*) dalam pengelolaan KSA, KPA, TB yang sistematis dan efektif. Proses perencanaan dalam pengelolaan kawasan konservasi terbagi dalam empat tahapan, dalam hal ini disebut

sebagai komponen perencanaan kawasan konservasi, yaitu inventarisasi potensi kawasan konservasi, proses pengukuhan kawasan, penataan kawasan, serta penyusunan rencana pengelolaan kawasan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku dalam hal pengelolaan kawasan konservasi.

Perencanaan yang efektif menjadi faktor pengungkit bagi efektifitas pengelolaan KSA, KPA dan TB secara keseluruhan. Efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB dapat diukur melalui empat tahapan atau empat komponen perencanaan kawasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Untuk mencapai suatu perencanaan yang efektif maka kondisi yang diharapkan dari empat komponen perencanaan KSA, KPA dan TB adalah sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi potensi kawasan dapat memenuhi ketersediaan data dan informasi potensi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya yang memadai untuk kebutuhan pengelolaan, serta data yang *up to date*, *reliable*, dan *valid* sehingga inventarisasi potensi perlu dirancang, dianalisis, dikelola, dan digunakan untuk kebijakan pengelolaan;
- 2) Pemolaan kawasan harus menciptakan status kawasan yang legal dan legitimate. Status kawasan yang legal ditandai dengan tahap pengukuhan sampai pada tingkat penetapan kawasan, sedangkan legitimate adalah bahwa batas-batas kawasan diakui oleh masyarakat dan *stakeholder*;
- 3) Penataan ruang kelola (zonasi/blok) disusun dengan mengakomodir kebutuhan pengelolaan di lapangan yang berbasiskan data dan informasi yang tersedia; serta
- 4) Rencana jangka panjang sebagai arahan pengelolaan kawasan tersedia, tersusun sesuai visi, misi dan tujuan pengelolaan, serta program dan kegiatan dapat dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi secara berkala.

2. PERSENTASE ENTITAS KERJASAMA YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Dalam upaya menjaga pelaksanaan kerja sama di KSA, KPA dan TB sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 44 Tahun 2017, maka penilaian tata kelola kerja sama di KSA, KPA dan TB menjadi sangat penting sehingga dapat diukur tingkat efektivitasnya. Kondisi ideal kerja sama yang efektif adalah tersedianya seluruh dokumen administrasi yang menjadi kewajiban PARA PIHAK yang bekerja sama dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, saat ini disinyalir masih banyak masyarakat kerja sama di KSA, KPA, dan TB yang belum efektif dan masih terdapat kewajiban-kewajiban administrasi yang belum

dipenuhi. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kerja sama kurang efektif dan belum mendukung pengelolaan KSA, KPA, dan TB.

Tata kelola kerjasama yang efektif dapat dicapai dimulai dari kepatuhan terhadap kelengkapan administrasi dan kedisiplinan dalam memenuhi setiap tahapan kewajiban. Dengan kelengkapan dan kedisiplinan ini diharapkan tata kelola kerja sama dapat dicapai. Penentuan kriteria penilaian pada alat ukur tata kelola kerja sama di KSA, KPA dan TB didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 44 Tahun 2017, sebagai turunan dari Pasal 43, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Penilaian akan dilakukan berdasarkan tiga kriteria, yaitu:

- 1) Kelembagaan dan kepastian hukum
- 2) Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama
- 3) Transparansi dan akuntabilitas

3. JUMLAH UNIT KSA, KPA, DAN TB DENGAN KATEGORI PENGELOLAAN EFEKTIF

Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan pengelolaan, selanjutnya hasil tersebut pun dapat digunakan untuk mengidentifikasi prioritas serta alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pengelolaan. Penilaian efektivitas pengelolaan pun mendukung terlaksananya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kawasan kepada publik. Penilaian efektivitas setiap unit kawasan dilakukan dua tahun sekali. Hal ini penting untuk melihat progres pengelolaan yang dilakukan oleh pemangku kawasan. Indikator ini mengukur jumlah unit KSA, KPA, dan TB yang telah memenuhi kriteria pengelolaan efektif berdasarkan hasil penilaian yang terstandar.

Pengelolaan efektif dimaknai sebagai kondisi di mana kawasan memiliki sistem perlindungan, pengamanan, dan pengendalian ancaman yang berjalan secara fungsional, serta didukung oleh tata kelola kelembagaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan konservasi. Batasan pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan alat *Management Effectiveness Tracking Tools* (METT). Perangkat tersebut merupakan etalase pengelolaan sebuah kawasan, dan oleh karenanya kegiatan-kegiatan yang mendukung pengelolaan termasuk dalam indikator penilaian. Unit kawasan yang menjadi sasaran IKK ini adalah unit kawasan yang memiliki hasil penilaian yang kurang efektif dan

tidak efektif. Subjek yang melakukan pengukuran mengikuti kaidah penilaian efektivitas yang mewajibkan keterlibatan para pihak, objek pengukurannya itu sendiri merupakan unit kelola kawasan yang didukung oleh berbagai kegiatan, baik yang kaitannya dengan dukungan manajemen, teknis ekosistem kawasan, maupun sosial masyarakat.

4. JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT YANG DIBINA DALAM UPAYA KONSERVASI KAWASAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati” didefinisikan sebagai jumlah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang dibina UPT melalui berbagai kegiatan guna mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Dalam tataran operasional kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar KSA/KPA/TB serta kegiatan bina cinta alam.

Masyarakat yang dibina dan menjadi objek pengukuran dalam konteks kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar KSA/KPA/TB atau yang kehidupannya memiliki keterkaitan dan ketergantungan pada potensi dan sumber daya alam di KSA/KPA/TB (P.43/2017). Masyarakat yang dibina dan menjadi objek pengukuran dalam konteks bina cinta alam, selain masyarakat setempat/sekitar KSA/KPA/TB, juga meliputi komponen masyarakat yang lebih luas.

Bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat guna mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi kawasan yang menjadi objek pengukuran meliputi kegiatan terkait pemberian akses serta berbagai kegiatan terkait peningkatan kapasitas kepada kelompok masyarakat (seperti pembentukan kelompok, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, pemberian bantuan usaha ekonomi, dll) yang dilakukan oleh UPT. Bentuk kegiatan bina cinta alam guna mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati yang menjadi objek pengukuran antara lain meliputi kegiatan pembentukan dan pembinaan kader konservasi, pembinaan kepada kelompok pencinta alam, dan lain-lain.

5. JUMLAH DESA DI SEKITAR KPA YANG MENDAPAT MANFAAT DARI JASA LINGKUNGAN

Jumlah desa di sekitar kawasan pelestarian alam yang memperoleh manfaat dari jasa lingkungan dimaksud akan diukur tidak pada seluruh jenis-jenis jasa ekosistem seperti pada definisi umumnya. Jasa lingkungan dimaksud dalam hal ini adalah jenis jasa lingkungan dari kawasan konservasi yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh warga masyarakat di desa-desa daerah penyangga kawasan konservasi. Jenis jasa lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah jasa lingkungan wisata alam serta jasa lingkungan air.

6. PERSENTASE PINTU MASUK OBJEK WISATA YANG MENERAPKAN E-TICKETING DAN CASHLESS PAYMENT

Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan *e-ticketing* dan *cashless payment* didasarkan pada jumlah obyek wisata pada kawasan konservasi saat ini, yaitu 580 pintu masuk obyek wisata. Penerapan *e-ticketing* dan *cashless payment* dimaksud dalam hal ini adalah layanan masuk dan berkegiatan bagi pengunjung obyek wisata di kawasan konservasi secara digital dan daring, melalui sebuah platform digital yang disiapkan oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Batasan pengukuran akan dilakukan terhadap seberapa banyak pintu masuk obyek wisata alam yang telah menerapkan *e-ticketing* dan *cashless payment* dimaksud.

E-ticketing adalah sistem penjualan tiket secara elektronik untuk berbagai layanan seperti transportasi (pesawat, kereta, bus), acara (konser, bioskop, olahraga), dan objek wisata. Sistem ini memungkinkan pembelian tiket secara daring melalui berbagai metode pembayaran, tidak memerlukan tiket fisik karena data tersimpan secara digital (misalnya dalam bentuk PDF atau QR code), sehingga lebih efisien, praktis, dan aman dari risiko kehilangan atau kerusakan tiket. Tiket dibeli melalui situs web atau aplikasi dan dikirim langsung ke pelanggan melalui email atau dapat diunduh dalam bentuk digital. Pelanggan dapat menggunakan tiket elektronik mereka dengan cara memindai *barcode* atau dengan menunjukkan kode pemesanan saat masuk ke lokasi atau melakukan *check-in*.

Adapun *cashless payment* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transaksi keuangan yang tidak melibatkan uang tunai secara fisik. Dalam sistem ini, pembayaran dilakukan melalui media elektronik, seperti kartu debit, kartu kredit, dompet digital, atau transfer bank. Teknologi *cashless* semakin banyak digunakan seiring dengan perkembangan digitalisasi dan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang terintegrasi dengan internet.

7. NILAI PNBP DARI PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KSA, KPA DAN TB

Indikator ini mengukur tingkat peningkatan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi. PNBP pemanfaatan jasa lingkungan terdiri atas iuran dan pungutan dari wisata alam, pemanfaatan air, panas bumi, dan lain-lain. Indikator ini dibatasi pada lingkup kewenangan Direktorat Jenderal KSDAE serta unit pelaksana teknis (UPT) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah PNBP yang dikenakan atas pemanfaatan potensi barang dan jasa yang diberikan oleh ekosistem, seperti wisata alam, air, panas bumi, serta karbon. Tarifnya telah diatur dalam peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang terkait, dan pembayaran dilakukan oleh pihak yang melakukan pemanfaatan, seperti perusahaan atau pengunjung wisata. PNBP dalam hal ini adalah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8. JUMLAH SPESIES YANG TERDATA SEBARAN DAN/ATAU POPULASINYA

Indikator kinerja kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi terkait potensi keanekaragaman hayati serta menyusun konsep rencana konservasi nasional yang komprehensif dan implementatif. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah penyediaan data dan informasi kekayaan spesies, sebaran spesies, kepadatan serta estimasi populasi melalui kegiatan inventarisasi.

Secara garis besar, upaya ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu prakondisi, inventarisasi, dan analisis data. Pengampu indikator kinerja ini adalah UPT di lapangan, dan oleh karenanya ruang lingkup kajian atau survey dalam pelaksanaannya menyesuaikan kondisi pada wilayah kerja masing-masing. Setiap UPT ditargetkan untuk melaporkan informasi terkait status kepadatan dan estimasi populasi setidaknya untuk satu spesies target. Namun demikian, setiap UPT juga diharapkan melakukan pencatatan seluruh spesies yang dijumpai selama kegiatan untuk memenuhi target pendataan sebaran spesies.

9. LUAS PEMULIHAN EKOSISTEM DI KSA, KPA, DAN TB

Konservasi keanekaragaman hayati sebagai penyedia jasa lingkungan berperan vital bagi kehidupan. Meskipun berstatus dilindungi, kawasan konservasi tidak juga luput dari ancaman degradasi. Tekanan ini disebabkan oleh dua sumber utama, yaitu faktor alami dan faktor antropogenik atau aktivitas manusia. Kegiatan seperti perambahan untuk alih fungsi lahan, pembalakan liar, serta spesies asing invasif menjadi penyebab utama degradasi ekosistem. Skala dan kompleksitas masalah degradasi ini menuntut sebuah solusi yang tidak parsial, melainkan melalui pendekatan holistik dan terintegrasi.

Pemulihan ekosistem merupakan upaya untuk memulihkan ekosistem pada kawasan konservasi sehingga terwujud keseimbangan ekologis pada kawasan tersebut. Hal ini bukan sekadar menanam pohon, melainkan menghidupkan kembali proses-proses fundamental seperti siklus nutrisi, aliran energi, dan interaksi antar spesies yang menjadi mesin penggerak ekosistem. Tujuannya adalah untuk mengembalikan sepenuhnya integritas ekosistem ke tingkat/ kondisi aslinya, atau kepada kondisi masa depan tertentu (*desired future condition/ DFC*) sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan. Seiring dengan itu, pemulihan juga berfokus pada keanekaragaman hayati dengan cara mengembalikan spesies kunci yang hilang atau berkurang populasinya, memperbaiki struktur komunitas tumbuhan dan satwa liar, serta mengelola secara aktif keberadaan spesies invasif yang dapat merusak keseimbangan. Komitmen pemulihan ekosistem sejalan dengan berbagai proses kebijakan di tingkat regional maupun internasional yang turut mengikutsertakan Indonesia, seperti *Convention on Biological Diversity* (CBD), *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), hingga *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pemulihan ekosistem, khususnya di kawasan dengan fungsi konservasi, akan berhasil apabila dilakukan secara efektif, efisien, dan melibatkan para pihak (Keenleyside et al., 2012). Pemulihan ekosistem yang dilakukan secara efektif akan memperkuat dan menjaga keberlanjutan nilai penting kawasan konservasi. Pemulihan ekosistem yang efektif harus memiliki target dan tujuan yang terukur, serta mengacu pada ekosistem referensi. Ekosistem referensi dapat berupa lokasi nyata atau tapak yang mencerminkan ekosistem sebelum kerusakan (situs referensi) atau model konseptual yang disintesis dari berbagai tapak referensi, indikator di lapangan, serta catatan historis (Standards Reference Group SERA, 2021). Parameter pada ekosistem referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan atau rona awal yaitu kondisi fisik, komposisi spesies, struktur komunitas di dalam ekosistem, fungsi ekosistem, interaksi dengan ekosistem di sekitarnya, dan penurunan ancaman. Pemulihan ekosistem yang efektif juga perlu mempertimbangkan

sumber ancaman serta pembelajaran dari hasil monitoring pelaksanaan dan kearifan lokal setempat dalam memulihkan ekosistem.

Implementasi pemulihan ekosistem dilaksanakan melalui beberapa tingkatan intervensi yang saling berhubungan, disesuaikan dengan tingkat degradasi dan tujuan spesifik, yaitu:

- 1) Fase Mitigasi dan Stabilisasi (Pengurangan Dampak & Remediasi): Fokus awal diarahkan pada stabilisasi lokasi, pengendalian ancaman utama, dan mitigasi dampak sosial-ekonomi. Dilanjutkan dengan upaya remediasi untuk memperbaiki fungsi-fungsi dasar ekosistem yang paling kritis, seperti perbaikan kualitas media lingkungan (tanah dan air).
- 2) Fase Peningkatan Fungsional (Rehabilitasi): Pada fase ini, tujuan strategisnya adalah meningkatkan produktivitas dan kapasitas fungsional ekosistem. Intervensi mencakup perbaikan struktur vegetasi dan inisiasi pengenalan jenis-jenis asli untuk mempercepat proses suksesi alami dan pemulihan jasa lingkungan esensial.
- 3) Fase Pemulihan Integritas Ekologis (Restorasi Ekologis): Merupakan tujuan strategis tertinggi, di mana upaya diarahkan untuk mengembalikan ekosistem ke lintasan historisnya. Targetnya adalah pemulihan komposisi spesies, struktur komunitas, dan interaksi ekologis yang kompleks, baik secara parsial maupun utuh, untuk mencapai kondisi ekosistem yang mandiri (*self-sustaining*).

Indikator luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB dibatasi pada intervensi pemulihan ekosistem yang akan dilaksanakan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Pemulihan Ekosistem (RKT-PE). Dokumen tersebut menjadi acuan pelaksanaan pemulihan ekosistem. Lokasi pemulihan ekosistem yang telah ditetapkan dalam dokumen RPE harus didukung dengan pemetaan/spasial dan nonspasial. Lokasi tersebut akan secara intensif dipulihkan dan dipantau secara periodik. Keberhasilan pemulihan ekosistem idealnya diukur dengan mengukur kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan ekosistem referensi yang telah dituangkan dalam RPE. Beberapa aspek yang dapat dijadikan indikator dalam mengukur keberhasilan pemulihan ekosistem antara lain: luas intervensi, kondisi fisik (tanah, air), struktur vegetasi, komposisi spesies, terkait aspek keanekaragaman jenis, jasa ekosistem, dan proses ekologis. Dalam hal ini, batasan pengukuran ketercapaian pemulihan ekosistem hanya akan diukur berdasarkan capaian outputnya, yaitu luas intervensi.



Pelepasan Tukik di Penetasan Semi Alami Penyu Taman Nasional Karimunjawa

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Pemerintah telah menetapkan RPJMN Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025. Direktorat Jenderal KSDAE dimandatkan untuk bertanggung jawab pada 9 dari 22 Indikator Kinerja (IK) Kementerian Kehutanan, dimana kinerja tersebut mendukung secara langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sembilan indikator kinerja Kementerian Kehutanan 2025-2029 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal KSDAE tersebut sebagaimana Tabel 10.

Tabel 10. Indikator Kinerja (IK) RPJMN Tahun 2025-2029 pada Direktorat Jenderal KSDAE

NO	NAMA INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029
1	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Kegiatan Prioritas	Unit	304	325	350	375	400
2	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Kegiatan Prioritas	Hektar	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Luas Pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	Kegiatan Prioritas	Hektar	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	Indeks Daftar Merah Nasional status keterancaman spesies	Kegiatan Prioritas	Poin	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76
5	Jumlah kelompok Masyarakat yang dibina dalam Upaya	Kegiatan Prioritas	Kelompok Masyarakat (kumulatif)	200	775	1.350	1.925	2.500

NO	NAMA INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029
	konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati							
6	Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Kegiatan Prioritas	Miliar Rupiah	26	26	27	27	28
7	Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Kegiatan Prioritas	Juta Hektar (Kumulatif)	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
8	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Kegiatan Prioritas	Miliar Rupiah	209	215	222	230	239
9	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Kegiatan Prioritas	Produk (Kumulatif)	15	15	20	20	25

Sembilan indikator kinerja yang diamanatkan pada RPJMN ini wajib dituangkan pada indikator kinerja Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029. Direktorat Jenderal KSDAE telah merancang sasaran program serta indikator kinerja program dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan nasional yang telah ada pada RPJMN serta sasaran strategis pembangunan kehutanan. Kinerja yang dirancang harus dapat berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan, Direktorat Jenderal KSDAE menyusun rancangan target kinerja secara berjenjang pada tingkatan program, kegiatan dan keluaran. Mandat pengelolaan keanekaragaman hayati oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029 mengusung tema: *“Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”*.

Adapun sasaran program dan indikator kinerja program yang menjadi target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE pada periode 2025-2029 adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 11.

Tabel 11. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Dirjen KSDAE pada periode 2025 - 2029

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
	SP1. Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati						
	SP1.1 Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i>	Spesies (Kumulatif)	5	15	25	35	50
	SP1.2 Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i>	Spesies (Kumulatif)	3	8	15	30	50
	SP2. Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga						
	SP2.1 Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Miliar Rupiah	200	210	220	230	240
	SP3. Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem						
	SP3.1 Nilai ekspor dan <i>bioprospecting</i>	Triliun Rupiah	7,75	7,80	8,00	8,20	8,40
	SP3.2 Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Miliar Rupiah	235,00	241,50	249,00	257,50	267,00
	Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik						
	SP1.SK1 Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetic						
	SP1.SK1.1 Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	200	433	678	810	1.100
	SP3.SK1 Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan						

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	SP3.SK1.1 Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk (Kumulatif)	15	15	20	20	25
	SP3.SK1.2 Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	Individu (Kumulatif)	100	200	300	400	500
	SP3.SK3 Meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari						
	SP3.SK3.1 Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Miliar Rupiah	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0
	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru						
	SP2.SK2 Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat						
	SP2.SK2.1 Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	33	50	50	50	50
	SP3.SK2 Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan						
	SP3.SK2.1 Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>cashless payment</i> (basis data = 580 pintu masuk)	Persen (%)	10,00	25,00	30,00	35,00	40,00
	SP3.SK2.2 Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Miliar (Rupiah)	209,00	215,00	222,00	230,00	239,00
	SP3.SK2.3 Luas Kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Juta Hektar (Kumulatif)	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
	Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi						
	SP1.SK3 Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi						
	SP1.SK3.1 Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	SP1.SK3.2 Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati							
	SP1.SK2 Optimalnya Perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem						
	SP1.SK2.1 Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65
	SP1.SK2.2 Presentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen (%)	10	13	13	15	17
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru							
	SP1.SK4 Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB						
	SP1.SK4.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit	304	325	350	375	400
	SP2.SK1 Meningkatnya keterlibatan Masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati						
	SP2.SK1.1 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (kumulatif)	200	775	1.350	1.925	2.500
Program Dukungan Manajemen							
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem							
	SK1 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas						
	SK1.1 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,80	3,82	3,83	3,84	3,85
	SK2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem						

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	SK1.2 Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	82,31	82,40	82,50	82,60	82,70

Setiap sasaran program didukung oleh sasaran kegiatan, dan indikator kinerja program didukung oleh indikator kinerja kegiatan secara berjenjang. Pada Sasaran Program 1 **“meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati”**, didukung oleh empat sasaran kegiatan, yaitu: (1) meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik (SP1.SK1) pada kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (2) optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem (SP1.SK2) pada kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati; (3) meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi (SP1.SK3) pada kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi; serta (4) meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB (SP1.SK4) pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

Pada Sasaran Program 2 **“meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga”** didukung oleh dua sasaran kegiatan, yaitu: (1) meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati (SP2.SK1) pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru; serta (2) terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat (SP2.SK2) pada kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

Pada Sasaran Program 3 **“meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem”** didukung oleh tiga sasaran kegiatan, yaitu: (1) meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan (SP3.SK1) pada kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (2) peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (SP3.SK2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan

Pelestarian Alam, dan Taman Buru; serta (3) meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari (SP3.SK3) pada kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik.

Pada aspek tata kelola dan kelembagaan, Direktorat Jenderal KSDAE juga berkontribusi pada pelaksanaan Program Dukungan Manajemen. Target kinerja pada Kegiatan Dukungan Manajemen merupakan dua sasaran generik dimana setiap sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat mengukur kualitas reformasi birokrasi serta pelayanan birokrasi yang adaptif dan akuntabel.

Dari Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan serta Kegiatan masing – masing Direktorat pada Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tahun 2025 – 2029 ditindaklanjuti dalam Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) masing – masing satuan kerja. Sasaran program dan indikatornya tersebut mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode 2025 – 2029 sebagai hasil dari pelaksanaan Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka arah kebijakan prioritas Balai Taman Nasional Karimunjawa pada unit kerja di atasnya. Hal tersebut untuk menjamin keterkaitan kebijakan Kementerian Kehutanan dengan kebijakan Unit Pelaksana Teknis. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional merupakan kompilasi dari kegiatan di pusat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan taman nasional. Matrik Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*) Balai Taman Nasional Karimunjawa tersaji pada tabel 12.

Tabel 12. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Taman Nasional Karimunjawa

NO	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
	Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik						
	SP1.SK1 Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetic						
	SP1.SK1.1 Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	5	10	15	20	25
	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru						
	SP2.SK2 Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat						
	SP2.SK2.1 Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	0	0	1	1	1

[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	SK1.1 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,90	3,92	3,94	3,97	4,00
	SK2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem						
	SK1.2 Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	87,49	87,69	87,89	88,09	88,29

Keberhasilan Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam tahun 2025-2029 akan diukur dengan 6 (enam) sasaran kegiatan serta 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan. Keseluruhan target kinerja tersebut, secara berjenjang akan mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE. Upaya pencapaian sasaran kegiatan Balai Taman Nasional Karimunjawa akan dilaksanakan melalui enam kegiatan, yaitu:

- Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik (1 IKK);
- Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (3 IKK);
- Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi (1 IKK);
- Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati (2 IKK);
- Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (2 IKK); serta
- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal KSDAE (2 IKK)

Dalam rangka mencapai target kinerja dari indikator kinerja kegiatan yang dimandatkan kepada Balai Taman Nasional Karimunjawa membutuhkan dukungan dan kerjasama dari masing – masing Direktorat yang ada di Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu: Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik (SP1.SK1), Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru pada sasaran kegiatan terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat (SP2.SK2) dan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (SP3.SK2), Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi pada sasaran kegiatan meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan

areal preservasi (SP1.SK3), Direktorat Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati pada sasaran kegiatan optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem (SP1.SK2), Direktorat Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru pada sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB (SP1.SK4) dan meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati (SP2.SK1), serta Eselon 1 lainnya yaitu Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan lainnya terkait Dukungan Manajemen.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pendanaan yang ideal untuk pelaksanaan upaya pencapaian target kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa secara indikatif dari tahun 2025 - 2029 adalah Rp. 111.501.171.000,00. Anggaran tersebut merupakan kebutuhan total untuk mencapai target kinerja dan kebutuhan belanja operasional perkantoran. Pemenuhan kebutuhan pendanaan tersebut dapat bersumber dari APBN (RM dan PNBPN).

Indikasi kebutuhan pendanaan akan disesuaikan secara tahunan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, termasuk pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan sesuai dengan arahan Presiden. Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan upaya pencapaian target kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam tahun 2025-2029, yang dirinci per tahun dan kegiatan secara indikatif disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Kerangka Pendanaan Target Kinerja Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2025-2029

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (X 1.000)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	234.132	120.000	135.600	153.228	173.148
2.	Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	2.733.100	761.000	859.930	971.721	1.098.045
3.	Konservasi Spesies dan Genetik	114.080	40.000	45.200	51.076	57.716
4.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan KSA, KPA, dan TB	23.787	20.000	22.600	25.538	28.858
5.	Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi	66.700	238.500	269.505	304.541	344.132
6.	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE	14.358.248	18.196.800	20.562.384	23.235.494	26.256.108
TOTAL		17.530.047	19.376.300	21.895.219	24.741.598	27.958.007



Panorama Senja di Pulau Nyamuk

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Taman Nasional Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan arahan pembangunan bidang konservasi keanekaragaman hayati dalam pencapaian tujuan pembangunan. Konservasi keanekaragaman hayati adalah upaya pengelolaan, yang meliputi aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam hayati, yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk tetap mempertahankan atau melestarikan keanekaragaman hayati sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaatnya dalam mendukung kehidupan umat manusia. Rencana ini menjadi acuan pada pencapaian target kinerja lima tahun mendatang dan bersifat indikatif. Pelaksanaan target – target kinerja dalam Rencana Strategis Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2025-2029 selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan serta rencana kerja dan anggaran.

Rencana Strategis Balai Taman Nasional Tahun 2025-2029 sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029, serta referensi yang berlaku secara global seperti *World Conservation Strategy*, Konvensi Keanekaragaman Hayati, *Sustainable Development Goals*, serta referensi lainnya. Dokumen ini menguraikan langkah-langkah pencapaian sasaran program hingga ke tingkat keluaran berupa indikator kinerja kegiatan beserta targetnya. Sasaran dan penjenjangan kinerja tersebut pada dasarnya terdiri atas upaya-upaya pencapaian target pada empat pilar pembangunan, yaitu pembangunan lingkungan/ekologi, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, serta tata kelola. Selain untuk kepentingan perencanaan, dokumen ini juga akan menjadi dasar pelaksanaan evaluasi kinerja. Keberhasilan Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam tahun 2025-2029 akan diukur dengan 6 (enam) sasaran kegiatan serta 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan. Keseluruhan target kinerja tersebut, secara berjenjang akan mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE. Upaya pencapaian sasaran kegiatan Balai Taman Nasional Karimunjawa akan dilaksanakan melalui enam kegiatan, yaitu: Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik (1 IKK), Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (3 IKK), Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi (1 IKK), Kegiatan

Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati (2 IKK), Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (2 IKK) serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal KSDAE (2 IKK).

Ketersediaan sumber daya tentu saja menjadi faktor penentu dalam pencapaian target. Perubahan-perubahan atas volume target yang dituangkan pada dokumen ini memungkinkan untuk dilakukan setiap tahun, sesuai dengan ketersediaan sumber daya, melalui mekanisme perencanaan pembangunan tahunan. Perubahan Rencana Strategis Balai Taman Nasional Tahun 2025-2029 juga dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah, perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan, dan kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran.

SENARAI PUSTAKA

Anonim. 2010. Laporan Akhir Kajian Nilai Ekonomi Pemanfaatan Sumber Daya Air Taman Nasional Karimunjawa. Semarang: CV Prambanan.

Balai Taman Nasional Karimunjawa. 2024. *Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2019*. Semarang: Balai Taman Nasional Karimunjawa.

Balai Taman Nasional Karimunjawa. 2024. *Revisi Zona Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa*. Semarang: Balai Taman Nasional Karimunjawa.

Balai Taman Nasional Karimunjawa. 2024. *Laporan Capaian Renstra 2020-2024*. Semarang: Balai Taman Nasional Karimunjawa.

Dirjen KSDAE. 2025. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2025 – 2029. Bogor: Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan.

Djarwaningsih, T., Yusuf, R., A.P. Keim, Z. Fanani, Wardi, and Supriatna. 2003. *Eksplorasi Flora, Serangga dan Studi Pendahuluan Ekologi Jenis Vegetasi di Taman Nasional Karimunjawa Jawa Tengah*. Bogor: Herbarium Bogoriense Bidang Botani Puslit Biologi LIPI.

Keim, Ary P., and Muhammad Amir. 2004. *Eksplorasi Tumbuhan di Kawasan Legon Goprak*. 2004: Herbarium Bogoriense - Bidang Botani - LIPI.

Marnane, M., R. Ardiwijaya, J. Wibowo, S. Pardede, T. Kartawijaya, and Y. Herdiana. 2005. *Laporan Teknis Survei 2003 - 2004 di Kepulauan Karimunjawa Jawa Tengah*. Bogor: WCS-Marine Indonesia Program.

Mulyadi, H. Susanto, Y.D. Dwijayanti, and F.F. Sahwan. 2015. *Interpretasi Trekking Mangrove Taman Nasional Karimunjawa*. Semarang: Balai Taman Nasional Karimunjawa.

Nababan, M.G., Munasik, I. Yulianto, T. Kartawijaya, R. Prasetya, R. Sulisyati, Mulyadi, and Y. Syaifuddin. 2009. *Status Ekosistem Taman Nasional Karimunjawa*. Bogor: WCS-IP.

Pardede, S, ART Sukmaraharja, F Setiawan, A Muttaqin, and Muhidin. 2016. *Laporan Teknis Monitoring Teknis Ekosistem Terumbu Karang Taman Nasional Karimunjawa*. Bogor: WCS.

Sulisyati, R., E. Poedjirahajoe, L.R.W. Faida, and C. Fandeli. 2015. *Daya Dukung Ekosistem Terumbu Karang untuk Kesesuaian Wisata Bahari di Taman Nasional Karimunjawa*. Yogyakarta: PSIK - Fakultas Kehutanan UGM.

Susanto, H, S Sumaryati, D Wisnuhamidaharisakti, MSJ Mardiko, and NA Lating. 2012. *Jenis-jenis Mangrove Taman Nasional Karimunjawa*. Semarang: Balai TN Karimunjawa.

Wirada, F. 2012. Hubungan antara Perilaku Wisatawan Snorkeling dan Kondisi Terumbu Karang di Pulau Menjangan Kecil Taman Nasional Karimunjawa. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Lingkungan UGM



Terumbu Karang di Taman Nasional Karimunjawa

LAMPIRAN 1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA TAHUN 2025-2029

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA TAHUN 2025-2029

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Balai Taman Nasional Karimunjawa								18.090.067	19.376.300	21.895.219	24.741.598	27.958.007
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan								3.131.618	1.179.500	1.332.835	1.506.104	1.701.899
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik												
	SP1.SK1 Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetic											
	SP1.SK1.1 Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	5	10	15	20	25	101.080	40.000	45.200	51.076	57.716
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru												

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	SP2.SK2 Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat											
	SP2.SK2.1 <i>Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan</i>	Desa	0	0	1	1	0	-	-	-	-	-
	SP3.SK2 Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan											
	SP3.SK2.1 <i>Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan e- ticketing dan cashless payment (basis</i>	Persen (%)	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	<i>data = 580 pintu masuk)</i>											
	SP3.SK2.2 Nilai PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Milliar Rupiah	1,535363	1,03448	1,89857	1,676263	1,726563	-	-	-	-	-
Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi												
	SP1.SK3 Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi											
	SP1.SK3.2 Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	0,1	0,18	5	5	5	61.817	238.500	269.505	304.541	344.132
Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati												

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	SP1.SK2 Optimalnya Perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem											
	SP1.SK2.1 <i>Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB</i>	Poin	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SP1.SK2.2 <i>Presentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel</i>	Persen (%)	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru												
	SP1.SK4 Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB											
	SP1.SK4.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	SP2.SK1 Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati											

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	SP2.SK1.1 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	3	4	4	4	4	-	-	-	-	-
Program Dukungan Manajemen												
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem								14.358.248	18.196.800	20.562.384	23.235.494	26.256.108
	SK1 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan											

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas											
	SK1.1 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,9	3,92	3,94	3,97	4,00	-	-	-	-	-
	SK2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen											

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem											
	<i>SK1.2 Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</i>	Poin	87,49	87,69	87,89	88,09	88,29	-	-	-	-	-

LAMPIRAN 2

LOKASI INDIKATIF TARGET KINERJA

BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN 2. INDIKATIF LOKASI TARGET KINERJA

INDIKATIF LOKASI TARGET KINERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	VOLUME	LOKASI TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
Balai Taman Nasional Karimunjawa							
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan							
Kegiatan Konservasi Spesies Genetik							
	SP1.SK1 Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetic						
	SP1.SK1.1 Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru							
	SP2.SK2 Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat						
	SP2.SK2.1 Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	-	-	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	-
	SP3.SK2 Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan						
	SP3.SK2.1 Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment (basis data = 580 pintu masuk)	Persen (%)	-	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa
	SP3.SK2.2 Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Milliar Rupiah	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa
Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi							
	SP1.SK3 Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi						

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	VOLUME	LOKASI TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
	SP1.SK3.2 Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa
Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati							
	SP1.SK2 Optimalnya Perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem						
	SP1.SK2.1 Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	BTN Karimunjawa	-	-	-	-
	SP1.SK2.2 Presentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen (%)	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru							
	SP1.SK4 Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB						
	SP1.SK4.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit	-	BTN Karimunjawa	-	BTN Karimunjawa	-
	SP2.SK1 Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati						
	SP2.SK1.1 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem							

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	VOLUME	LOKASI TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
	SK1 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas						
	<i>SK1.1 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</i>	Poin	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa
	SK2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem						
	<i>SK1.2 Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</i>	Poin	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa	BTN Karimunjawa

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029 BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA



KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

Jl. Sinar Waluyo Raya No. 248, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50273
Telp. 024 - 76738248, Email: btnkj@yahoo.co.id, Web: tnkarimunjawa.id



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**